



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIAMIS,

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS


H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 20



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tahun 2019 - 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2022**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra instansi terkait di lingkup Kementerian dan SOPD terkait di Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

Atas kerjasama semua pihak terkait yang melibatkan unsur pimpinan, pejabat dan staf yang mampu memberikan masukan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, maka tersusunlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Dengan demikian diharapkan perubahan renstra ini dapat merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan yang dilakukan khususnya hingga tahun 2024.

Dengan tersusunnya perubahan rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, diharapkan kepada pihak terkait dapat memanfaatkan sebagai bahan acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa perubahan renstra ini belum sempurna dan memerlukan masukan dan saran dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan di masa datang.

Akhirnya disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan perubahan rencana strategis ini.

Ciamis, 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN CIAMIS



SLAMET BUDI WIBOWO, SP. M.Si

NIP. 196702041996031004

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	10
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12
	2.2. Sumberdaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
	3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	51
	3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Provinsi Jawa Barat	60
	3.4. Telaahan tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
	3.5. Penentuan Isu-isu strategis	70
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	72
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	73
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	79
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
BAB VIII	PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen Perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Karena mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, maka secara otomatis Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Ciamis, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Selain itu, Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai induk dari lembaga yang menangani pertanian dan pangan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban dalam penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam kurun waktu tahun 2019–2024.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, merupakan dokumen Perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2014–2019, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya RENSTRA tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan alasan :

1. Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
2. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan pembagian urusan yang diatur di dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan yang termasuk ke dalam kewenangan daerah kabupaten/ kota terkait dengan urusan Pangan dan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian**, yang untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan penyelenggaraan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. **Penyelenggaraan ketahanan pangan**, yang untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan; (a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten kota; (c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan (d) pelaksanaan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

3. **Penanganan kerawanan pangan**, yang untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan (a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, (b) penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; dan (c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota.
4. **Keamanan pangan**, yang untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
5. **Sarana Pertanian**, yang untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan pengawasan dan penggunaan sarana pertanian.
6. **Prasarana Pertanian**, untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan pengembangan prasarana pertanian.
7. **Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**, untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
8. **Perizinan usaha pertanian**, untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dijabarkan dalam bentuk kewenangan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota.

Untuk menjembatani implementasi kebijakan tersebut di tingkat kabupaten/kota dan dikaitkan juga dengan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka untuk urusan pangan dan pertanian di Kabupaten Ciamis telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / Permentan / OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang mendasari dibentuknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah dimaksud sesuai tugas dan fungsi dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan urusan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka telah dilakukan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024, yang merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Perubahan Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Perubahan Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan berorientasi jauh ke depan serta mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga kekayaan sumber daya mineral tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang potensi sumberdaya mineral dan energi serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanian. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis.

Fungsi dan kedudukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta pedoman dalam penyusunan anggaran Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemeritah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
13. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
14. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani;
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
23. Peraturan Presiden Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional, Penyuluh Pertanian
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
 35. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;
37. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
45. Peraturan Bupati Ciamis No 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
46. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
47. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 100 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
48. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah : peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang pangan dan pertanian;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pangan dan pertanian;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat rumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di semua daerah di Indonesia termasuk pula di Kabupaten Ciamis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis No 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan di Kabupaten Ciamis, melalui aturan pendukung yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang di dalamnya meliputi kewenangan pada bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang penyuluhan dan bidang prasarana dan sarana pertanian.

Untuk pengaturan tata kerja di tingkat kecamatan, melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mengatur tentang keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang salah satunya merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

Sebagaimana diatur dalam Bagian kesebelas tentang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Bupati Ciamis No 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, deskripsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

C. Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas fungsi setiap unsur jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1 Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- c. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- Pengelolaan perlengkapan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kelompok Substansi Perencanaan

Kelompok substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kelompok Substansi Keuangan

Kelompok Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- pelaksanaan verifikasi keuangan;
- pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

- a. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan lahan dan air, pembiayaan, investasi serta perlindungan tanaman.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan program kerja di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyediaan dan pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- Pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang pertanian;
- Penyusunan petunjuk teknis perlindungan pertanian;
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi

Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Lahan dan Irigasi;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian dan sejenisnya;
- pelaksanaan pengumpulan data lahan dan irigasi pertanian;
- menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani/produksi, dan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pertanian dan sejenisnya;
- penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan kelompok tani terkait;
- penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Lahan dan Irigasi;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen;
- penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terkait pupuk, pestisida dan alsintan;
- pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- pengoordinasian dan inventarisasi data terkait penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Kelompok Substansi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi

Kelompok Substansi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi di bidang pertanian;
- pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim serta hal terkait lainnya;
- pengumpulan dan pengolahan data OPT dan dampak perubahan iklim;
- pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan di bidang pertanian;

- penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- pelaksanaan pengumpulan data, penyiapan bahan penanggulangan dan fasilitasi terkait penanggulangan bencana pertanian;
- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
- pendampingan, bimbingan, fasilitasi, supervisi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

- a. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja peningkatan produksi dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman pangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan
 - Penyusunan petunjuk teknis terkait perbenihan, sarana prasarana, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
 - Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan areal tanam pengembangan Tanaman Pangan;
 - Penyusunan petunjuk teknis penggunaan sarana produksi Tanaman Pangan;
 - Pengendalian pengembangan Tanaman Pangan;
 - Pembinaan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan fasilitasi produksi, pemantauan penggunaan benih, fasilitasi sertifikasi benih/bibit Tanaman Pangan;

- Pemberian fasilitasi /keterangan teknis terkait usaha pertanian di bidang Tanaman Pangan;
- Pelaksanaan penerapan teknologi perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kelompok Substansi Serealia

Kelompok Substansi Serealia menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman serealia;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan Serealia;
- penyusunan rencana tanam dan panen tanaman serealia;
- perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi serealia;
- fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih serealia;
- pelaksanaan pengembangan pertanian serealia ramah lingkungan;
- pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman serealia;
- pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
- bimbingan peningkatan mutu dan penerapan teknologi produksi serealia;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Kelompok Substansi Palawija

Kelompok Substansi Palawija menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman palawija;

- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan palawija;
- penyusunan rencana tanam dan panen tanaman palawija;
- perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi palawija;
- fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih palawija;
- pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman palawija;
- pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian palawija ramah lingkungan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kelompok Substansi Perbenihan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan teknis terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan;
- penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian;

- pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas tanaman pangan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

- a. Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Holtikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja peningkatan produksi dan fasilitasi pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.
- c. Bidang Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;
 - penyusunan petunjuk teknis terkait perbenihan, sarana prasarana, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas hortikultura dan perkebunan;
 - pengendalian pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - pembinaan perencanaan kebutuhan,penyediaan, dan fasilitasi produksi, pemantauan penggunaan benih, fasilitasi sertifikasi benih/bibit hortikultura dan perkebunan;
 - pemberian fasilitasi/keterangan teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - pelaksanaan penerapan teknologi perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;

- pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas SDM, persiapan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis pasar hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kelompok Substansi Produksi Hortikultura

Kelompok Substansi Produksi Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas hortikultura;
- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas hortikultura;
- penyusunan rencana/sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura;
- pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi hortikultura;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan hortikultura;
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan hortikultura ramah lingkungan;
- pembinaan, bimbingan teknis, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi, dan pendokumentasian di bidang tugasnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan perbenihan/pembibitan pada komoditas hortikultura;
- pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Substansi Produksi Perkebunan

Kelompok Substansi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas perkebunan;
- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas perkebunan;
- penyusunan rencana/sasaran tanam, panen dan produksi tanaman perkebunan;
- perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi perkebunan;
- pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi perkebunan;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan perkebunan;
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan perkebunan;
- pembinaan, bimbingan, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas perkebunan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran

Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas SDM, persiapan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis pasar hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;

- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi hortikultura dan perkebunan;
- penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
- pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan;
- pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyuluhan

- a. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan.
- c. Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya ekonomi (SDE);

- melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, teknologi informasi dan sarana prasarana penyuluhan lainnya;
- Pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian baik aparatur maupun non aparatur;
- pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi sesuai wilayah kerjanya;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan

Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan kelembagaan penyuluhan;
- penyiapan bahan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- pengumpulan, penyusunan data kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

- penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan

Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan ketenagaan penyuluhan;
- perencanaan penyusunan program penyuluhan;
- pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh;
- penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
- penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi penyuluh berprestasi;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluh dan kegiatan penyuluhan;
- pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan

Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan metode dan informasi penyuluhan;

- penyiapan bahan penyusunan materi, informasi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- pelaksanaan pengemasan materi dan informasi teknologi;
- penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan metode penyuluhan;
- penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Ketahanan Pangan

- a. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan bahan rumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
 - penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
 - penyusunan pedoman atau panduan dan juklak juknis di bidang ketahanan pangan;
 - pelaksanaan analisa dan kajian ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan dan unit kerja terkait;
 - pelaksanaan pendampingan di bidang ketahanan pangan;

- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- penyiapan data dan informasi untuk penyusunan dan analisis tentang ketersediaan pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG) serta peta kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di ketersediaan dan kerawanan pangan, termasuk sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- penyiapan data dan informasi kelembagaan dan infrastruktur cadangan pangan;
- penyiapan bahan pendampingan di ketersediaan dan kerawanan pangan;
- penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan lokal);
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan supervisi di bidang tugasnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.2. Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan

Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;

- penyiapan bahan analisis tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;
- penyiapan bahan penyusunan pedoman/juklak dan juknis serta rencana pelaksanaan kegiatan di distribusi dan harga pangan;
- penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta penyiapan bahan kajian pasokan dan harga pangan;
- penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- Penyiapan bahan pendampingan di distribusi dan harga pangan;
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di distribusi dan harga pangan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.3. Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan

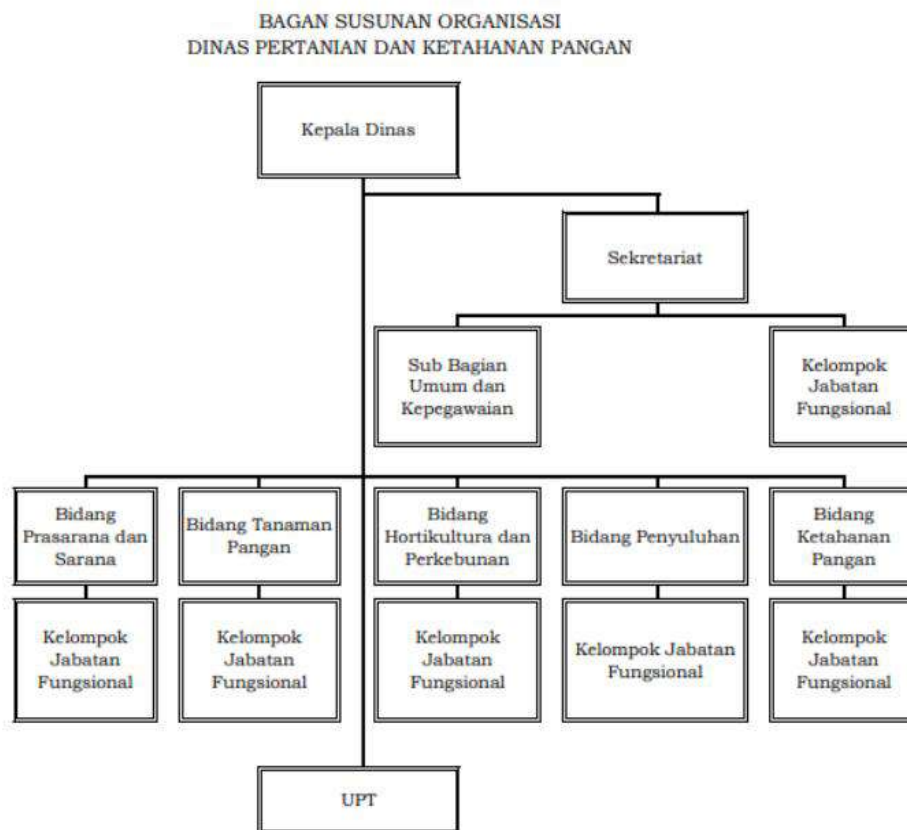
Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan masyarakat melalui perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- penyiapan data/informasi pangan lokal dan produksi pangan serta peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap mutu pangan segar pada skala kecil/rumah tangga dan menengah;
- pengelolaan dan analisis data/informasi keamanan pangan segar;
- pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis pada kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
- penyiapan bahan pendampingan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis



Sedangkan pada lingkup unit pelaksana teknis (UPT), sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dibentuk UPT sebanyak 17 UPT yang terdiri dari 14 UPT pengembangan pertanian dan

ketahanan pangan ditambah 3 UPT yang bersifat teknis yaitu UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan, serta UPTD Pemasaran Hasil Pertanian. Adapun sebaran wilayah kerja UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sebaran Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	UPTD	Kedudukan	Wilayah kerja
1	UPTD perbenihan Tanaman Pangan	Banjarsari	Kab. Ciamis
2	UPTD Pemasaran Hasil Pertanian	Panumbangan	Kab. Ciamis
3	UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan	Cipaku	Kab . Ciamis
4	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Ciamis	Ciamis	Ciamis, Baregbeg, Sadananya
5	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cijeungjing	Cijeungjing	Cijeungjing, Cimaragas, Cidolog
6	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cikoneng	Cikoneng	Cikoneng dan sindangkasih
7	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Kawali	Kawali	Kawali, Cipaku, Panawangan
8	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti
9	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Panumbangan	Panumbangan	Panumbangan
10	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Panjalu	Panjalu	Panjalu dan lumbang
11	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Sukamantri	Sukamantri	Sukamantri
12	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Rancah	Rancah	Rancah, Tambaksari, Cisaga
13	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Rajadesa	Rajadesa	Rajadesa, Jatinagara, Sukadana

No	UPTD	Kedudukan	Wilayah kerja
14	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Banjarsari	Banjarsari	Banjarsari, Banjarnayar
15	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Purwadadi	Purwadadi	Purwadadi
16	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Lakbok	Lakbok	Lakbok
17	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Pamarican	Pamarican	Pamarican

Sedangkan untuk mawadahi unsur penyuluh lapangan pertanian, telah dibentuk pula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan pengganti dari peran fungsi BP3K (Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) karena terjadi perubahan struktur kinerja. Adapun sebaran BPP di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sebaran Kedudukan dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
1	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ciamis	14	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panawangan
2	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baregbeg	15	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jatinagara
3	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cijeungjing	16	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rajadesa
4	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sadananya	17	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rancah
5	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cipaku	18	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambaksari
6	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kawali	19	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukadana

NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
7	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lumbung	20	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cisaga
8	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panjalu	21	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cimaragas
9	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukamantri	22	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cidolog
10	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panumbangan	23	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pamarican
11	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cihaurbeuti	24	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarsari
12	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sindangkasih	25	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lakbok
13	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cikoneng	26	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwadadi
		27	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjaranyar

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Sumber daya manusia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang tangguh dan berkualitas.

Adapun komposisi pegawai DPKP Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai DPKP Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	4	4	8
3	Bidang Prasarana dan Sarana	2	4	6
4	Bidang Tanaman Pangan	5	2	7
5	Bidang Hortikultura dan Perkebunan	4	-	4
6	Bidang Penyuluhan	2	3	5
7	Bidang Ketahanan Pangan	2	3	5
8	UPTD	13	12	25
9	Kelompok Jabatan Fungsional	35	22	57
	JUMLAH TOTAL	68	50	118

Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPKP per September 2021 adalah sebanyak 118 orang. Komposisi pegawai DPKP Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 68 orang laki-laki atau 57,63 % dan perempuan sebanyak 50 orang atau 42,37 %.

Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai DPKP Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah PNS	Golongan																			
			IV					III					II					I				
			A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml
1	Kepala Dinas	1		1			1															
2	Sekretariat	8	1				1	1	2	1	4		1	1	1	3						
3	Bidang Prasarana dan Sarana	6					1	1	1	3	6											
4	Bidang Tanaman Pangan	7	2				2	1	1	1	3				2	2						
5	Bidang Hortikultura dan Perkebunan	4	2				2		1	1	2											
6	Bidang Penyuluhan	5								3	3				2	2						
7	Bidang Ketahanan Pangan	5						1		4	5											
8	UPTD	25	3				3	3	5	13	21				1	1						
9	Kelompok Jabatan Fungsional	57	1	5	4		10	17	3	9	29		14		4	18						
	TOTAL	118	12	5	4		21	22	17	32	71		15	1	10	26						

**Tabel 2.5. Rekapitulasi Pegawai DPKP Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Uraian	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		1									1
2	Sekretariat		1	3					4			8
3	Bidang Prasarana dan Sarana			6								6
4	Bidang Tanaman Pangan		3	2		1			1			7
5	Bidang Hortikultura dan Perkebunan		2	2								4
6	Bidang Penyuluhan		1	2					2			5
7	Bidang Ketahanan Pangan			5								5
8	UPTD		4	16	1	2			2			25
9	Kelompok Jabatan Fungsional			27	9	4			17			57
	TOTAL	0	12	63	10	7	0	0	26	0	0	118

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis merupakan aset/modal yang dimiliki oleh SKPD sebagai sarana prasarana dalam memperlancar melaksanakan pelayanan dan operasional kegiatan di dalamnya terdiri dari lahan untuk bangunan kantor, bangunan kantor di kabupaten dan kecamatan, kendaraan dinas operasional, meubeuler, komputer/laptop dan lainnya.

Uraian lengkap terkait dengan deskripsi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis berdasarkan data inventarisasi aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini.

Tabel 2.6. Deskripsi Sarana Dan Prasarana Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tanah untuk Bangunan Kantor	95.309	M2
2	Gedung Kantor BPP	99	Unit
3	Kendaraan Mini Bus Roda Empat	14	Unit
4	Kendaraan Roda Dua	125	Unit
5	Meja Biro	51	Buah
6	Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	110	Buah
7	Kursi putar	17	Buah
8	Kursi kayu jok	48	Buah
9	Kursi Besi/Metal	132	Buah
10	Zice	1	Buah
11	Kursi Tamu	10	Buah
12	Kursi Tamu di ruang Pejabat	7	Buah
13	Kursi lipat	336	Buah
14	Rak Kayu	69	Buah
15	Komputer PC	27	Unit
16	Note Book	73	Buah
17	Laptop	38	Buah
18	Printer (Mini Komputer)	91	Buah
19	Printer (Personal Komputer)	6	Buah
20	Telepon Fax	1	Buah
21	TV Color	19	Buah
22	Handy Cam	6	Buah
23	Kamera Digital	52	Buah
24	Wiresless	9	Buah
25	Megaphone	67	Buah
26	Microphone	76	Buah

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
27	<i>Sound System</i>	14	Buah
28	KipasAngin	14	Buah
29	Dispenser	4	Buah
30	Alat Ukur Universal (GPS) <i>Global Positioning System</i>	3	Buah
31	Alat Pendingin (AC) <i>Air Conditioner</i>	2	Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Capaian hasil Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7. Kinerja Pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Tukar Petani (NTP)		112,8		106-107	107-108	108-109	109-110	112,8	105,61	112,01	112,76	112,78	111,93	99,63	103,71	103,45	102,53	99,23
2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		77,50		75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	76,20	76,70	89,80	89,40	91,50	100,93	100,92	117,39	116,10	118,06
3	Penguatan Cadangan pangan		25,00		5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	18,00	22,00	15,20	21,00	29,69	360,00	220,00	101,33	105,00	118,76
4	Produksi sektor pertanian		561.000		571.106	571.380	577.476	577.476	561.000	556.832	602.022	550.000	577.476	602.667	97,50	105,36	95,24	100,00	107,43
5	Produksi sektor perkebunan		21.420		23.287	24.165	25.053	25.952	21.420	19.640	20.854	21.000	21.364	19.123	84,34	86,30	83,82	82,32	89,28
6	Ketersediaan pangan utama		461.000		449.134	449.171	455.047	460.557	461.000	566.518	549.961	450.000	455.135	504.118	126,14	122,44	98,89	98,82	109,35
7	Ketersediaan energi per kapita		2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3.550	3.531	3.592	2.445	2.723	147,92	147,13	149,67	101,88	113,46
8	Ketersediaan protein		63		63	63	63	63	63	99	96	102	84	93,84	157,62	152,02	161,11	133,48	148,95
9	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		66		65	65	65	66	66	66	64	66	67	65,53	101,62	99,72	102,26	101,24	99,44
10	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)		100		100	100	100	100	100	103	105	103	115	104,6	102,90	114,8	107,7	104,6	104,6
11	NTP subsector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				101	102	104	104	104	101	108	104	106	107,65	100,45	105,73	99,69	102,13	103,51

Selama kurun waktu lima tahun (2016 - 2020) bidang pertanian menjadi titik berat pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis, hal tersebut didukung oleh potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Ciamis yang besar dan variatif serta kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, kebun dan hutan).

Dalam kurun waktu 2016-2020, produktivitas padi telah mencapai target pada tahun 2016, 2018, dan 2019, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 tidak mencapai target karena banyak serangan OPT (Wereng Batang Coklat dan Tikus). Untuk indikator urusan pangan yaitu skor Pola Pangan Harapan, penguatan cadangan pangan, ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi, ketersediaan protein, serta persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) telah mencapai target dari tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis sudah cukup baik.

Capaian indikator urusan pertanian untuk jumlah produksi pertanian sudah cukup baik, namun untuk jumlah produksi perkebunan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan terdapat tanaman yang sudah tua dan sudah tidak menghasilkan. Perlu peremajaan tanaman pada beberapa komoditi perkebunan.

Pada Tahun 2020 nilai tukar petani berada pada kondisi yang cukup sejahtera, meskipun Nilai tukar petani tersebut lebih rendah target dari yang direncanakan sebesar 112,8 poin. Hal tersebut menggambarkan komponen pengeluaran rumah tangga tani atau yang disebut indeks yang dibayar oleh petani umumnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk biaya usaha tani (biaya produksi dan penambahan barang modal). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga yang lebih besar akan cepat mempengaruhi indeks yang dibayar petani.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target NTP adalah Penurunan permintaan produk pertanian pada saat Pandemi Covid-19 sebagai akibat dari terganggunya proses distribusi dan penurunan daya beli. Meskipun demikian, NTP masih menunjukkan kondisi yang baik (>100). NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	573.740.000	731.511.000	760.949.000	688.096.000	674.426.250	566.374.109	722.886.668	756.572.190	676.271.702	631.236.021	98,72	98,82	99,42	98,28	93,60	4,99	3,76
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	392.532.500	711.347.450	-	672.191.000	605.017.500	384.429.000	711.347.450	-	672.187.000	604.431.100	97,94	100,00	-	100,00	99,90	7,19	6,26
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	50,00	100,00	100,00	-	-	25,00	-
Program peningkatan disiplin aparatur	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	25,00	25,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	243.684.500	274.149.500	152.571.000	156.600.000	40.000.000	238.814.500	273.849.500	152.571.000	156.600.000	40.000.000	98,00	99,89	100,00	100,00	100,00	25,92	25,36
Program peningkatan kesejahteraan petani	-	1.482.164.250	1.876.534.000	660.000.000	485.440.000	-	1.378.087.650	1.823.014.608	660.000.000	483.840.000	-	92,98	97,15	100,00	99,67	16,17	14,55
Program peningkatan ketahanan pangan	2.877.343.000	1.839.549.100	2.281.011.000	8.820.100.000	337.800.000	2.862.287.137	1.834.231.900	2.278.437.704	3.813.575.627	321.782.430	99,48	99,71	99,89	43,24	95,26	44,61	8,97
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	326.200.000	259.750.000	162.530.000	161.000.000	60.000.000	325.930.000	259.170.000	160.530.000	161.000.000	60.000.000	99,92	99,78	98,77	100,00	100,00	30,37	30,25
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	8.692.082.614	4.703.613.000	3.503.574.000	5.575.751.000	929.500.000	8.541.390.206	4.694.758.000	3.490.936.465	5.570.112.750	877.445.700	98,27	99,81	99,64	99,90	94,40	23,90	23,84
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	-	951.009.100	1.671.114.000	2.573.000.000	1.189.477.000	-	932.660.000	1.599.770.000	2.492.718.000	1.187.751.400	-	98,07	95,73	96,88	99,85	18,98	18,75
Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan	-	2.000.000.000	47.420.000	-	250.000.000	-	1.937.087.400	45.990.000	-	250.000.000	-	96,85	96,98	-	100,00	49,41	49,41
Program peningkatan produksi perkebunan	-	110.475.000	-	-	-	-	110.475.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	25,00	25,00
Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	-	-	-	-	7.390.000.000	-	-	-	-	7.349.336.800	-	-	-	-	99,45	-	-
JUMLAH	13.139.582.614	13.073.568.400	10.465.703.000	19.306.738.000	11.961.660.750	12.948.224.952	12.864.553.568	10.317.821.967	14.202.465.079	11.805.823.451	98,54	98,40	98,59	73,56	98,70	8,25	0,08

Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik (>90 %), sedangkan pada tahun 2019 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik (<90 %). Realisasi pencapaian penyerapan dana untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 73,56 %. Dari total anggaran Rp. 19.306.738.000,- terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 14.202.465.079,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.201.469.690,-, berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 98.196.769,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.104.272.921,-. Hal ini merupakan akumulasi dari efisiensi anggaran serta kegiatan yang tidak terserap dan lainnya yang dikembalikan ke kas negara/daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya membantu Bupati melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Analisis Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Renstra Kementerian/KL dan Renstra Provinsi terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Adalah sebagai berikut.

1. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan sasaran komoditas utama sebagai berikut :

1. Bidang Tanaman Pangan : padi, jagung, dan kedelai;
2. Bidang Hortikultura dan Perkebunan: Cabai merah, pisang, kelapa dalam, dan kopi;
3. Bidang Ketahanan Pangan :
 - Aspek Ketersediaan Pangan: teknologi pertanian yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi komoditas pangan di Kabupaten Ciamis.
 - Aspek Distribusi dan Harga : semakin meningkatnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan.
 - Aspek Penganekaragaman Konsumsi Pangan : semakin meningkatnya jangkauan informasi kepada masyarakat dapat menjadi peluang dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman; serta belum termanfaatkannya sebagaimana potensi sumber daya lahan pekarangan untuk budidaya bahan pangan lokal.

- Aspek Keamanan Pangan : semakin meningkatnya jangkauan informasi kepada masyarakat dapat menjadi peluang dalam penyebarluasan informasi mengenai produk pangan yang berbahaya.

Berdasarkan hasil capaian, sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sudah baik, namun yang masih menjadi tantangan bagi pengembangan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah peningkatan produksi hortikultura dan tanaman pangan serta menjaga stabilitas produksi produk-produk perkebunan. Komoditas tanaman pangan yang mengalami peningkatan produksi masih seputar Padi dan Jagung, komoditas lainnya (kedelai) dan komoditas hortikultura belum mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya disebabkan karena sebagian besar tanaman hortikultura tidak tahan terhadap cuaca atau kelembaban tinggi akibat curah hujan yang cukup tinggi yang mendorong terjadinya gangguan OPT. Selain itu, faktor harga juga sangat menentukan minat petani dalam melaksanakan budidaya tanaman hortikultura. Pencapaian produksi komoditas perkebunan utamanya kopi cukup menggembirakan namun masih perlu terus ditingkatkan. Peningkatan produktivitas menjadi perhatian yang serius dikarenakan produktivitas yang tinggi dapat menjadi harapan bagi petani untuk memperoleh hasil penjualan yang sesuai harapan.

Pencapaian produksi komoditas hortikultura masih rendah baik secara regional maupun nasional. Untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi pada komoditas tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis berupaya melalui pemberian bantuan benih/bibit, pupuk, peningkatan teknologi dan sarana prasarana pertanian/perikanan serta berupaya untuk senantiasa mendapatkan dukungan dari Kementerian/Provinsi/Lembaga lainnya dalam pengembangan komoditas tersebut.

2. Renstra Kementerian Pertanian

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian, tantangan dan peluang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, yaitu ;

A. Tantangan

1) Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2) Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana di Indonesia masih cukup besar terutama pada wilayah pedalaman dan wilayah-wilayah yang berada pada area rawan bencana. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam daerah dan pengelolaan stok pangan. Kabupaten Ciamis merupakan daerah produksi padi yang mengalami surplus produksi dari tahun ke tahun. Tetapi karena faktor akses distribusi yang sulit dijangkau maka hasil produksi wilayah sentra banyak dipasarkan keluar kabupaten sedangkan beberapa wilayah justru mendatangkan beras dari kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam daerah yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen.

B. Peluang

1) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat

Revitalisasi lumbung pangan dilakukan dengan mengaktifkan kembali lumbung-lumbung padi dan menjadikannya berperan penting sebagai salah satu sarana penopang bagi perwujudan ketahanan pangan masyarakat. Keberadaan kelembagaan kelompok tani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar untuk mengadakan revitalisasi lumbung pangan kelompok tani. Selain itu melalui setiap desa dapat membangun lumbung pangan desa yang dapat dibiayai oleh dana desa terutama bagi desa-desa penghasil beras.

2) Pengembangan usaha masyarakat

Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;

3) Optimalisasi pemanfaatan lahan

Ciamis memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman.

3. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Tantangan dan peluang bagi pembangunan pertanian di Jawa Barat adalah bagaimana meningkatkan keunggulan komparatif produk pertanian secara kompetitif menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar Nasional. Dalam lingkup budidaya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk unggulan daerah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil penilaian kinerja Dinas, permasalahan dan hambatan serta dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maka tantangan utama pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Jawa Barat adalah:

1. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
2. Menurunnya kualitas tanah (lahan) pertanian khususnya di wilayah utara.
3. Lambatnya perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi.

4. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/ kebanjiran).
5. Menurunnya minat terhadap usaha tani.
6. Kemampuan permodalan petani terbatas.
7. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.

Peluang pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Jawa Barat dalam menciptakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

1. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan.
2. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian global.
3. Ketersediaan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Sumberdaya Buatan dalam agribisnis.
4. Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak.
5. Pengembangan infrastruktur, sarana-prasarana di perdesaan masih bisa meningkat.
6. Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura terbuka luas.
7. Sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian di Jawa Barat
8. Mensejahterakan petani
9. Menyediakan pangan
10. Sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah
11. Merupakan pasar input bagi agroindustri
12. Menghasilkan devisa
13. Menyediakan lapangan pekerjaan
14. Peningkatan pendapatan Nasional
15. Tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya.

4. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat:

1. Terfokus pada peningkatan produksi belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*);

2. Tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah;
3. Masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal;
4. Terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi;
5. Penetapan standar pangan yang semakin ketat.

Sedangkan peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mengembangkan pelayanan adalah :

1. Pemasok pangan utama DKI Jakarta;
2. Konsumen pangan paling tinggi;
3. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA);
4. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Daya saing daerah yang mampu menarik investasi;
6. Daya tarik pariwisata agribisnis Jawa Barat wisatawan asing dan domestic;
7. Potensi Pengembangan Wilayah agribisnis.

Jumlah penduduk Jawa Barat cukup tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat per tahun akan mendorong permintaan kebutuhan pangan per kapita terus meningkat didukung pergeseran meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita.

Secara umum potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, adalah besarnya jumlah penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Di bidang konsumsi, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Penduduk ini juga merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perkonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Ciamis. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sektor pertanian			
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih belum optimal	Menurunnya kesuburan lahan pertanian	Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan
		Kerusakan infrastruktur pertanian	Sarana jalan usaha tani banyak yang sudah tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat dalam pengangkutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kondisi jaringan irigasi yang sudah tidak layak masih banyak, sehingga perlu perbaikan serta masih perlu adanya pembangunan/penambahan irigasi baru.
		Tingkat kehilangan hasil masih tinggi dan Keterbatasan jumlah petugas lapangan	Masih tingginya tingkat kehilangan hasil padi dan tanaman pangan lainnya, sehingga secara umum capaian produksi dan produktivitas masih relatif rendah
			Mutu produksi relatif belum optimal, sehingga konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya masih memilih produk luar yang dianggap lebih baik berdasarkan kajian mereka, seperti penggunaan kedelai untuk bahan baku tempe, tahu, kecap dan lain-lain
			Masih rendahnya pengetahuan petani tentang teknologi budidaya pertanian sehingga masih mengandalkan kebiasaan
			Pengetahuan petani akan teknologi panen dan pasca panen masih rendah sehingga masih mengandalkan penjualan langsung hasil produksi dibandingkan mengolahnya terlebih dahulu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sektor Ketahanan Pangan			
1.	Aspek Ketersediaan Pangan	Ketebatasan cadangan pangan daerah dan rusaknya lumbung pangan masyarakat	Kemampuan kapasitas produksi pangan belum cukup mendukung kemandirian pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk
		Semakin berkurangnya lahan pertanian	Peningkatan konsumsi pangan pokok tidak diimbangi dengan luasan lahan pertanian yang cenderung terus berkurang sebagai akibat pemanfaatan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya
			Perencanaan ketersediaan pangan belum dilakukan berdasarkan aturan kecukupan pangan
			Dukungan dan peran OPD teknis dalam peningkatan ketersediaan pangan belum optimal
2.	Aspek Distribusi Pangan, Harga dan Cadangan Pangan		Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi
			Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu dan belum diimbangi dengan pemanfaatan pangan lokal secara optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Panjangnya rantai pemasaran
3.	Aspek Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan kaedah-kaedah konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang yang salah satunya disebabkan oleh daya beli masyarakat akan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan pola asuh yang salah terhadap bayi dan anak balita, berdampak pada terjadinya kasus-kasus balita gizi buruk
			Belum berkembangnya teknologi pasca panen yang tepat guna dan terjangkaunya pengolahan pangan berbasis pangan lokal
			Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan
			Konsep pola pangan harapan dan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang belum dipahami dan dilaksanakan secara optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Aspek Keamanan Pangan		Terbatasnya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dan produk pangan yang berpotensi mengandung bahan kimia dan bahan tambahan pangan berbahaya dan belum efektifnya penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas
			Kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan
5.	Aspek Manajemen dan Pelayanan Umum		Terbatasnya sarana prasarana, SDM teknis fungsional yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
			Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan SKPD dalam mewujudkan ketahanan pangan
			Terbatasnya data pendukung Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi fungsi dan peran aparatur serta sinergitas antar unit di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan pihak terkait lainnya.

- 2) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan meliputi cadangan pangan, diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan, penanganan daerah rawan pangan, stabilitas harga pangan strategis, usaha mandiri pangan serta analisis terkait indikator ketahanan pangan masyarakat.
- 3) Pencapaian target produksi tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian serta kapasitas penyuluhan pertanian dalam rangka penerapan teknologi pertanian, pembinaan kelompok usaha dan utama serta fasilitasi aspek pendukung lainnya.
- 5) Peningkatan ketersediaan sarana/prasarana/infrastruktur pertanian
- 6) Peningkatan pengelolaan lahan dan air untuk pertanian
- 7) Peningkatan kapasitas kinerja penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta produk olahan lainnya.
- 8) Pengembangan fasilitasi usaha, pembiayaan, investasi, dan kerjasama di bidang pertanian.
- 9) Peningkatan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Janji Bupati dan Wakil Bupati Ciamis

Telaahan terhadap visi, misi, dan janji Bupati/Wakil Bupati Ciamis dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Telaahan Keterkaitan Permasalahan dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dengan Visi dan Misi Daerah serta Janji Bupati/Wakil Bupati Ciamis

Visi : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA				
Janji Bupati dan Wakil Bupati Ciamis : Penataan Kawasan Ekonomi Rakyat				
No	Misi/Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan petani	a. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal	a. Fasilitasi sarana prasarana dan akses penunjang pemasaran belum memadai	a. Adanya peluang mitra usaha dan fasilitasi pengembangan produk hasil pertanian dan peluang menjalin kerjasama dan fasilitasi permodalan dengan pihak jasa keuangan dan investor lainnya
		b. Peningkatan hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan	b. Keterpaduan pengelolaan kawasan pertanian dan fasilitas penunjang peningkatan hasil produksi pertanian serta produksi olahan belum memadai	b. Adanya potensi dan regulasi pengembangan kawasan pertanian serta pengembangan produksi hasil pertanian dan olahan dengan keberadaan instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat

No	Misi / Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3: Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal			
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;	a. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan Dukungan fasilitas pemanfaatan lahan dan air untuk pertanian belum memadai	a. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat propinsi dan pusat terkait penyediaan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
		b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal;	b. Kinerja penerapan teknologi belum optimal	b. Adanya regulasi terkait lahan dan fasilitasi pengembangan teknologi dan informasi pertanian
		c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;	c. Fasilitasi penunjang Peningkatan perbenihan pertanian belum memadai.	c. Adanya peluang pengembangan perbenihan di bidang pertanian untuk menunjang usaha pertanian
		d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);	d. Fasilitasi penunjang pengendalian OPT belum memadai.	d. Adanya Fasilitasi kegiatan pendukung terkait penyediaan sarana pengendali OPT dengan instansi terkait serta penerapan teknologi pengendalian hama terpadu
		e. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;	e. Peningkatan pertumbuhan sektor non pertanian tinggi dikaitkan dengan penggunaan lahan	e. Adanya potensi dan regulasi pengelolaan lahan pertanian dan keberadaan instansi terkait di daerah, propinsi dan pusat
		f. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;	f. Keterbatasan sumber air potensial yang menunjang kebutuhan air tanaman	f. Adanya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pengembangan sumber air

No	Misi / Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	a.Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;	a.Diversifikasi pangan masih terbatas	a.Adanya regulasi terkait pangan dan kebijakan lain di tingkat daerah, propinsi dan pusat termasuk didalamnya diversifikasi pangan dan pengembangan keanekaragaman pangan
		b.Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan;	b.Kesadaran masyarakat tentang B2SA perlu ditingkatkan	b.Adanya dewan ketahanan pangan dan lembaga terkait lainnya
		c. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);	c. Masih terbatasnya sarana prasarana usaha di bidang pangan termasuk didalamnya cadangan pangan pemerintah daerah	c. Adanya instansi terkait penanganan pangan di tingkat propinsi dan pusat serta optimalisasi lumbung pangan masyarakat
		d. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu.	d.Media Informasi tentang pentingnya konsumsi pangan lokal belum memadai	d. Adanya dewan ketahanan pangan tingkat kabupaten dan instansi terkait dalam menyebarkan informasi konsumsi pangan non beras

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan pertanian serta urusan pangan yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka fungsi dan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia” dan misi ke-3 yaitu “membangun

perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah Terkait di Provinsi Jawa Barat

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra perangkat daerah terkait di lingkup Provinsi Jawa Barat, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian diuraikan pada Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah Terkait di Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>a. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula;</p> <p>b. Terjaminnya distribusi pangan;</p> <p>c. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi;</p> <p>d. Meningkatnya konsumsi pangan lokal;</p> <p>e. Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah;</p> <p>f. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing;</p> <p>g. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi;</p> <p>h. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani;</p> <p>i. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;</p> <p>j. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian;</p>	<p>a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;</p> <p>b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal;</p> <p>c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;</p> <p>d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);</p> <p>e. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis;</p> <p>f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;</p> <p>g. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal;</p>	<p>a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian;</p> <p>b. Semakin tingginya alih fungsi lahan;</p> <p>c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian;</p> <p>d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi;</p> <p>e. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian;</p> <p>f. Aksebiltas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas;</p> <p>g. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi; keterbatasan jumlah petugas lapangan.</p>	<p>a. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian dan pangan;</p> <p>b. Daya dukung lahan dan sumber daya manusia pertanian;</p> <p>c. Peran kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Perangkat daerah di tingkat propinsi Jawa Barat;</p> <p>d. Tata ruang dan wilayah yang mendukung pengembangan kawasan pertanian.</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	k. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	<p>h. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>i. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan</p> <p>j. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;</p> <p>k. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);</p> <p>l. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan.</p>		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra perangkat daerah Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura & Dinas Perkebunan				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan c. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/ petani terutama alat pasca panen; b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal; c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan; d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); e. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis; f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi d. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian e. Aksebiltas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas f. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi g. Keterbatasan jumlah petugas lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian dan pangan b. Daya dukung lahan dan sumber daya manusia pertanian c. Peran kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Perangkat daerah di tingkat propinsi Jawa Barat d. Tata ruang dan wilayah yang mendukung untuk pengembangan kawasan pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra perangkat daerah Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura & Dinas Perkebunan				
		<ul style="list-style-type: none"> g. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura; h. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal; i. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan 		
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan				
	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi	a. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;	a. Keterbatasan cadangan pangan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan cadangan beras daerah dan koordinasi dengan Bulog/Dolog b. Koordinasi bersama Tim TPID

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra perangkat daerah Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan				
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan; c. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); d. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu. 	<ul style="list-style-type: none"> b. penggalian informasi pasar pangan strategis dan koordinasi pengendalian harga belum optimal c. Fasilitas pendukung penanganan daerah rawan bencana belum optimal d. Keterbatasan fasilitas koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> c. pengembangan pangan lokal d. Koordinasi penanganan daerah rawan pangan e. koordinasi Dewan Ketahanan Pangan daerah

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis berupaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar Jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan;

dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Telaahan Keterkaitan Permasalahan dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dengan Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Agropolitan b. Kawasan cepat tumbuh lumbung padi b. Kawasan budidaya potensial 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan Alih fungsi lahan bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis b. kelengkapan infrastruktur pendukung lainnya merupakan kewenangan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum terimplementasin ya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis 2. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Aturan / kebijakan pemerintah terkait pertanian b. Lahan potensial untuk dikembangkan c. Peran fungsi pihak terkait

No	Rencana Tata Ruang wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		c. fasilitasi pendukung lainnya berada pada kewenangan instansi terkait.	3. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan dan pemukiman belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian 4. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal	d. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk e. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), permasalahan pelayanan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.5. sebagai berikut.

Tabel 3.5. Telaahan Keterkaitan Permasalahan dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Ketersediaan pangan komoditas padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam	<p>a. Kelengkapan infrastruktur pendukung lainnya merupakan kewenangan instansi terkait</p> <p>b. fasilitasi pendukung lainnya berada pada kewenangan instansi terkait.</p>	<p>a. Belum terimplementasinya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis</p> <p>b. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi</p>	<p>a. Aturan / kebijakan pemerintah terkait pertanian</p> <p>b. Lahan potensial untuk dikembangkan</p> <p>c. Peran fungsi pihak terkait</p>

No	KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			c. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan dan pemukiman belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian d. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal	e. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. Validasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
3. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Kaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis tersebut di atas, maka isu strategis pembangunan terkait dengan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian, dan perkebunan;
3. Penerapan teknologi produksi pertanian, dan perkebunan serta mekanisasinya secara terpadu;
4. Penanggulangan penyakit tanaman;
5. Penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas SDM agribisnis;
6. Penguatan jalan pertanian;
7. Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional;
8. Penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan lahan dan air;
9. Pemantapan penataan agribisnis;
10. Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam;

Sedangkan terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pangan

1. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan;
3. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
4. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu.

B. Urusan Pertanian

1. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;
2. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal;
3. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;
4. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
5. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis;
6. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;
7. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;
8. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal;
9. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Ciamis digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, beberapa langkah yang akan dilakukan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
4. Memperkuat faktor pendukung pembangunan pertanian berupa sarana prasarana, teknologi, penguatan sumber daya manusia pertanian, optimalisasi pengelolaan lahan dan air serta penanganan industri hilir.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel. 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tujuan / sasaran (tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks pengeluaran per kapita	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61
	1.Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,12	100,25	100,39	101,00	101,25
2. Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah		Nilai Tukar Petani (NTP)	112,0	112,2	112,4	112,6	112,8
		Persentase Pertumbuhan PDRB kategori pertanian, perikanan dan kehutanan	1,66	2,68	2,77	2,86	2,94
	2.Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Jumlah Produksi pertanian dan perkebunan	561.000	572.220	583.664	595.337	607.244
		Padi	390.000	399.000	410.000	417.000	426.234
		Jagung	20.000	21.000	21.200	23.000	24.000
		Kedelai	45	50	55	60	65
		Ubi kayu	30.000	31.000	31.200	33.000	34.000
		Cabe besar	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		Tomat	770	780	790	800	810
		Pisang	90.300	90.330	90.400	90.600	90.700

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tujuan / sasaran (tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Cabe rawit	900	905	907	909	1.000
		Komoditas tanaman pangan lain	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		Komoditas hortikultura lain	3.400	3.345	3.000	3.238	3.400
		kopi	685	700	715	730	735
		kelapa dalam	17.000	17.010	17.097	17.500	17.600
2. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah		Skor Pola Pangan Harapan	89,7	90	90,6	91,2	91,8
	3.Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan	90,92	91,02	91,12	91,22	91,32
		% AKE	100	100	100	100	100
		Jumlah ketersediaan energi per kapita	2400	2400	2400	2400	2400
		Jumlah ketersediaan protein per kapita	63	63	63	63	63

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan ketahanan pangan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Ciamis, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian dan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan tujuan yaitu : ***Meningkatnya daya beli masyarakat serta Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah*** yang akan dicapai melalui indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Pengeluaran per Kapita; Persentase Pertumbuhan PDRB

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Nilai Tukar Petani; dan Skor Pola Pangan Harapan.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan terkait pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah terkait pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Meningkatnya kesejahteraan petani
3. Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan DPKP Kabupaten Ciamis selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Keterkaitan antara Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Mantapnya kemandirian ekonomi , sejahtera untuk semua		
Misi ke 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		
Tujuan DPKP	Sasaran DPKP	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan daya beli masyarakat;	Meningkatnya kesejahteraan petani;	Meningkatkan , nilai tambah komoditas unggulan pertanian/ perkebunan;	Meningkatkan penanganan pasca panen komoditas unggulan /prioritas;
Misi ke 3	Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal		
Tujuan DPKP	Sasaran DPKP	Strategi	Arah kebijakan
2. Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	1.Meningkatkan produksi dan kualitas komoditas unggulan pertanian/ perkebunan;	1.Mengembangkan sentra dan kluster komoditas unggulan; 2.Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian/ perkebunan secara terintegrasi; 3. Meningkatkan kinerja SDM dan kelembagaan pertanian melalui penerapan teknologi dan pengembangan informasi;

Tujuan DPKP	Sasaran DPKP	Strategi	Arah kebijakan
			4.Meningkatkan pengelolaan lahan dan air serta pengembangan sarana prasarana pertanian; 5.Meningkatkan pengendalian OPT dan DPI
	Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Memperkuat daya dukung ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, keamanan konsumsi pangan masyarakat

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Khusus penyusunan rencana strategis ini, kebijakan yang dirumuskan merupakan penyesuaian dan penggabungan dari berbagai instrument penjabaran kebijakan SKPD dan tugas fungsinya pasca diberlakukannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tentang Tentang Perangkat Daerah dan di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur

Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang didalamnya menggabungkan beberapa kewenangan pada bidang tanaman pangan, hortikultura, sarana /prasarana pertanian, penyuluhan, perkebunan dan ketahanan pangan serta dikaitkan dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Ciamis.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program urusan pangan dan pertanian di Kabupaten Ciamis untuk tahun 2019 - 2024 akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis serta sesuai dengan misi ke-1 Kabupaten Ciamis yaitu **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** serta misi ke-3 Kabupaten Ciamis yaitu **Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**.

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah serta meningkatnya daya beli masyarakat, dirumuskan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan.

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPKP Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPKP Kabupaten Ciamis

Tabel 6.1. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS																
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN PERTANIAN																
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah			Nilai Tukar Petani	Nilai	112,78	112		112,2		112,4		112,60		112,8	112,8	
			Persentase Pertumbuhan PDRB kategori pertanian, perikanan dan kehutanan	%	2,87	1,66		2,68		2,77		2,86		2,94	2,94	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Ton	546.638	561.000		572.220		583.664		595.337		607.244	607.244	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian (kw /Ha)	kw/ha	65,5	65,5	785.750.000	65,7	800.000.000	65,9	804.035.980	66,1	900.000.000	66,3	960.000.000	66,3
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	100	560.250.000	100	700.000.000	100	655.528.480	100	750.000.000	100	800.000.000	100	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	307.750.000	1	400.000.000	1	455.528.480	1	500.000.000	1	500.000.000	1	
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	252.500.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lokasi sebaran benih unggul lokal	%	-	3,7	225.500.000	3,7	100.000.000	7,4	148.507.500	11,1	150.000.000	14,8	160.000.000	14,8	
	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	-	1	225.500.000	1	100.000.000	1	148.507.500	1	150.000.000	1	160.000.000	1	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	Persen	170	180	7.560.000.000	190	4.170.000.000	200	14.736.428.910	210	16.100.000.000	220	17.500.000.000	220
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	%	-	3,7	380.000.000	7,4	100.000.000	11,1	1.014.691.260	14,8	1.100.000.000	18,5	1.300.000.000	18,5
		Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	-	1	380.000.000	1	100.000.000	1	1.014.691.260	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	%	75	80	7.180.000.000	85	4.070.000.000	90	13.721.737.650	95	15.000.000.000	100	16.200.000.000	100
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	18	18	4.100.000.000	18	4.070.000.000	28	11.825.000.000	28	11.200.000.000	28	13.000.000.000	120
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	9	1.400.000.000	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	11
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	8	1.400.000.000	1	200.000.000	9
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	17	17	1.680.000.000	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	19
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kec. serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	3	1.896.737.650	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	9	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	85	86	137.500.000	87	150.000.000	88	172.295.000	89	200.000.000	90	300.000.000	90
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	85	86	137.500.000	87	150.000.000	88	172.295.000	89	200.000.000	90	300.000.000	90
		Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1000	1000	137.500.000	1000	150.000.000	1000	172.295.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000
		Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	50.000.000	500

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	85	86	60.000.000	87	70.000.000	88	248.864.700	89	250.000.000	90	300.000.000	90
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang mendapat pengawasan	%	85	86	60.000.000	87	70.000.000	88	248.864.700	89	250.000.000	90	300.000.000	90
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1
		Sub kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	10	10	60.000.000	10	70.000.000	10	248.864.700	10	250.000.000	10	250.000.000	10
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Ton	546.638	561.000		572.220		583.664		595.337		607.244		607.244

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	3	3	1.674.917.000	3,3	6.530.000.000	3,6	5.161.665.000	3,8	5.200.000.000	4	5.440.000.000	4
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	%	85	86	1.674.917.000	87	6.530.000.000	88	5.161.665.000	89	5.200.000.000	90	5.440.000.000	90
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	27	27	367.500.000	27	430.000.000	27	381.510.000	27	400.000.000	27	410.000.000	27
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	27	27	368.790.000	27	3.400.000.000	27	883.955.000	27	900.000.000	27	910.000.000	27
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	6	6	938.627.000	17	2.700.000.000	27	3.896.200.000	27	3.900.000.000	27	4.000.000.000	27
		Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN PANGAN																
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan			Nilai	90,82	90,92		91,02		91,12		91,22		91,32		91,32
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	100	100	415.000.000	100	850.000.000	100	2.845.170.600	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan utama	%	14,45	17,86	415.000.000	18	850.000.000	18,3	2.845.170.600	18,6	3.100.000.000	19	3.100.000.000	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	1	1	40.000.000	1	600.000.000	2	2.062.837.000	2	2.100.000.000	2	2.100.000.000	7
		Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1	375.000.000	1	250.000.000	1	782.333.600	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi	kkal/kap/hr	2400	2400	337.800.000	2400	830.000.000	2400	1.460.322.400	2400	1.680.000.000	2400	1.780.000.000	2400
			Ketersediaan protein	gr/kap/hr	63	63		63		63		63		63		63
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	%	90	90	28.750.000	90	35.000.000	90	218.620.000	90	270.000.000	90	320.000.000	90

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1
		Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	-	-	-	1	35.000.000	1	118.620.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	5	5	28.750.000	-	-	5	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.000.000	5
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	21	29	100.000.000	33	50.000.000	37	200.000.000	41	300.000.000	45	340.000.000	45

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1
		Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	21	8	100.000.000	4	50.000.000	18	200.000.000	25	300.000.000	26	330.000.000	81
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi pangan	kkal/kap/hr	2.150	2.150	209.050.000	2.150	745.000.000	2.150	1.041.702.400	2.150	1.110.000.000	2.150	1.120.000.000	2.150
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	166.250.000	1	700.000.000	1	891.702.400	1	900.000.000	1	910.000.000	1
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	42.800.000	1	45.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan yang dibina	%	-	-	-	65	55.000.000	67	327.095.000	69	365.000.000	70	430.000.000	70

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan desa rentan rawan pangan yang dibina	%	-	-	-	12	10.000.000	13	60.000.000	14	65.000.000	15	70.000.000	15
		Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	4
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lokasi penanganan kerawanan pangan	%	-	-	-	65	45.000.000	67	267.095.000	69	300.000.000	70	360.000.000	70
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	1
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen	-	-	-	1	45.000.000	1	267.095.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	%	-	-	-	-	-	73	104.550.000	74	110.000.000	75	170.000.000	75
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengujian keamanan pangan yang dilakukan	%	-	-	-	-	-	73	104.550.000	74	110.000.000	75	170.000.000	75
		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	1	104.550.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
NON URUSAN																
Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DistanKP	Hasil penilaian	76,54	82,66		83,21		83,74		84,39		84,99		84,99
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran , pengumpulan data, pengklasifikasian , pengikhtisaran , dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah		2. Hasil evaluasi AKIP DistanKP	Predikat	B	B		BB		BB		BB		A		A
	3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah		3. Nilai Pelaporan Keuangan DistanKP	Hasil penilaian	650	650		660		758,56		770		780		780
	4. Meningkatkan penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah		4. Level Maturitas SPIP DistanKP	Level	3	3		3		3		3		4		4
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik; 2. Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur; 3. Persentase kelengkapan pelaporan keuangan	%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	17.687.460.061	1. 100% 2. 100% 3. 100%	17.677.917.930	1. 100% 2. 100% 3. 100%	20.441.694.090	1. 100% 2. 100% 3. 100%	22.278.354.947	1. 100% 2. 100% 3. 100%	22.439.454.947	1. 100% 2. 100% 3. 100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	181.000.000	3	570.304.000	3	593.800.000	3	614.000.000	3	614.000.000	14
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	171.000.000	2	562.804.000	2	580.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	9
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah laporan akuntabilitas	Dokumen	1	1	10.000.000	1	7.500.000	1	13.800.000	1	14.000.000	1	14.000.000	5

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	Dokumen	2	2	16.217.016.311	2	16.105.470.000	2	16.622.364.340	2	18.262.954.947	2	18.262.954.947	2
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	118	118	16.197.016.311	118	16.090.474.000	118	16.599.364.340	118	18.238.954.947	118	18.238.954.947	118
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	1	7.498.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	1	7.498.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur pertanian yang terdidik dan terlatih	Orang	2	2	10.000.000	2	9.200.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	10
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	10.000.000	2	9.200.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	10
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengadministrasian umum perangkat daerah	bulan	12	12	375.366.250	12	290.891.730	12	647.326.500	12	679.000.000	12	694.000.000	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	27.600.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	18.000.000	1	15.474.240	1	203.475.000	1	205.000.000	1	210.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	34.806.250	1	52.345.000	1	66.250.000	1	70.000.000	1	71.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	94.155.000	1	99.918.750	1	102.721.500	1	105.000.000	1	110.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	12.000.000	1	14.796.000	1	17.280.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	204.405.000	1	93.357.740	1	230.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	36.075.000	12	49.506.250	12	59.003.250	12	60.000.000	12	65.000.000	12
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	4	36.075.000	4	49.506.250	4	59.003.250	4	60.000.000	4	65.000.000	20
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	317.060.000	12	231.885.950	12	632.000.000	12	651.400.000	12	651.500.000	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	500.000	1	1.000.000	1	1.300.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	160.200.000	1	155.010.950	1	335.200.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	156.360.000	1	75.875.000	1	295.500.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	550.942.500	12	420.660.000	12	1.877.200.000	12	2.000.000.000	12	2.140.000.000	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	100	396.992.500	100	300.000.000	100	366.000.000	100	400.000.000	100	440.000.000	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	28	28	153.950.000	28	120.660.000	28	1.511.200.000	28	1.600.000.000	28	1.700.000.000	28
		TOTAL					28.658.427.061		31.132.917.930		46.302.121.680		50.183.354.947		52.419.454.947	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran daerah bertujuan untuk memberikan arah tujuan dan sasaran dari visi dan misi perangkat daerah dengan indikator kinerja yang menggambarkan mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi dinas dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 2019-2024. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis setiap tahun atau pencapaian outcome setiap tahun yang mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan arahan kebijakan bidang Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan bidang urusan kedalam indikator kinerja program yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2019-2024. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I	RPJMD								
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	nilai	112,78	112,0	112,2	112,4	112,6	112,8	112,8
2	Skor PPH	Nilai	89,4	89,7	90	90,6	91,2	91,8	91,8
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (TPB2)	Ku/Ha	65,5	65,5	65,7	65,9	66,1	66,3	66,3
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	14,45	17,86	18,00	18,30	18,60	19,00	19,00
II	Renstra SKPD								
1	NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Nilai	103,8	100,12	100,25	100,39	101,00	101,25	101,25
2	Jumlah Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	546.638	561.000	572.220	583.664	595.337	607.244	607.244
3	Skor PPH ketersediaan	Nilai	90,82	90,92	91,02	91,12	91,22	91,32	91,32
4	Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)	%	106	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah ketersediaan energi per kapita	kcal/kap/hari	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
6	Jumlah ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hari	63	63	63	63	63	63	63
7	Indeks Pertanaman	Persen	170	180	190	200	210	220	220
8	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	85	86	87	88	89	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pertanian dan pangan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pertanian dan pangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan dan lokasi kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pertanian dan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini.

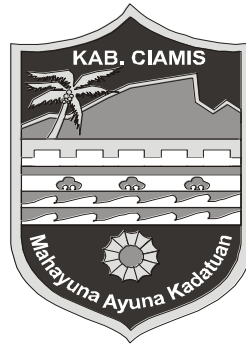
Ciamis, 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS



SLAMET BUDI WIBOWO, SP. M.Si

NIP. 196702041996031004



RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. LEMBUR SITU NO.44 CIAMIS TLP. 0265771044 – 46211 CIAMIS

2023

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan, yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RPJMD dan RPJPD, dan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Bidang dalam lingkup Perangkat Daerah pada tahun yang direncanakan.

Setelah melalui tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berdasarkan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis telah menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024, yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penyusunan Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024, Perubahan Renstra DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025; serta memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Bidang dalam lingkup DPKP Kabupaten Ciamis dalam bentuk rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Dengan mengintegrasikan berbagai potensi lain yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, penyusunan Renja DPKP Kabupaten

Ciamis Tahun 2024 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri, maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024, dan sekaligus mewujudkan tujuan akhir Visi dan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019-2024.

Ciamis, Agustus 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Ciamis



Slamet Budi Wibowo, SP., M.Si
Pembina Tk.1 - IV/b
NIP. 196702041996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	46
BAB V PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Renja PD Tahun 2024 merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024. Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja PD merupakan turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun untuk lima tahun. Dengan demikian, Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Renstra DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, serta merupakan rencana kerja tahun kelima atau tahun terakhir dari Perubahan Renstra DPKP Kabupaten Ciamis periode 2019-2024.

Selain mengacu pada Perubahan Renstra DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, penyusunan Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 juga mengacu pada RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024. RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didalamnya memuat prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), namun tetap dapat menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan terkini. Selain itu, RKPD juga memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 juga melalui tahapan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional, serta Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dari uraian tersebut maka Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra DKPK Kabupten Ciamis Tahun 2019-2024. Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 menjadi instrument penting dalam menerjemahkan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan untuk memajukan pembangunan bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Ciamis dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024, perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program, kegiatan atau sub kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja DPKP Tahun 2024 diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pertanian dapat lebih mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 akan menjadi pedoman untuk menyusun anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- q. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Tahun 2020-2024;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2024;
- z. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- bb. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud disusunnya Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan bagi DPKP Kabupaten Ciamis untuk periode Tahun 2024 sejak tanggal ditetapkan, yang mencakup program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPKP Kabupaten Ciamis, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DPKP Kabupaten Ciamis dan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- b. Merupakan gambaran terhadap kinerja DPKP Kabupaten Ciamis sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

1.3.2 Tujuan disusunnya Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
- b. Menetapkan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPKP Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2024, sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DPKP Kabupaten Ciamis;
- c. Sebagai instrument evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra DPKP Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Menjadi pedoman bagi DPKP Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, proses Penyusunan Renja DPKP Kabupaten

Ciamis, keterkaitan antara Renja DPKP Kabupaten Ciamis dengan dokumen RKPD, Renstra DPKP Kabupaten Ciamis, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Dinas Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kewenangan urusan bidang Pertanian dan Pangan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPKP Kabupaten Ciamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPKP Kabupaten Ciamis, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPKP KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKP Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja DPKP Kabupaten Ciamis sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPKP Kabupaten Ciamis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPKP Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP Kabupaten Ciamis

Berisikan uraian mengenai : (1) sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPKP Kabupaten Ciamis; (2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPKP Kabupaten Ciamis; (3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); (4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPKP Kabupaten

Ciamis; dan (5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPKP KABUPATEN CIAMIS

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKP Kabupaten Ciamis.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPKP Kabupaten Ciamis

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKP Kabupaten Ciamis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPKP Kabupaten Ciamis.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : (a) faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; (b) uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; (c) penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan (d) tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : (a) catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; (b) kaidah-kaidah pelaksanaan; serta (c) rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis selama Tahun 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis 2022 telah terlewat. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja OPD dan Renstra sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Ciamis

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2 09	Urusan pemerintahan bidang pangan									
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi	100	105,2	100	107,4	107,4	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan utama	19	21,73	18,3	18,3	100	18,6	18,6	97,9
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	7	1	2	2	100	2	5	71,4
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5	2	1	1	100	1	4	80
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan energi 2. Ketersediaan protein	1. 2.400 2. 63	1. 2.636 2. 82,29	1. 2.400 2. 63	1. 2.867 2. 91,64	1. 119,46 2. 145,46	1. 2.400 2. 63	1. 2.400 2. 63	1. 100 2. 100
	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	90	89,7	90	90	100	90	90	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	1	1	1	100	1	1	100		
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi pangan	2.150	2.263	2.150	2.309	107,39	2.150	2.150	100		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	1	1	100	1	1	100		
3	Urusan Pemerintahan pilihan											
3	27	Urusan pemerintahan bidang pertanian										
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian (kw/Ha)	66,3	65,76	65,9	63,71	96,68	66,1	66,1	99,7
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	1	1	100	1	1	100		
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Pertanaman	220	199,54	200	218	109	210	210	95,4
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	18,5	7,4	11,1	11,1	100	14,8	14,8	80		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1	1	1	1	100	1	1	100		
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	100	100	90	100	111	95	95	95		
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	120	18	32	32	100	28	78	65		

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	-	1	1	100	-	1	100
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	90	-	88	88	100	89	89	98,9
			Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	90	-	88	88	100	89	89	98,9
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1000	-	17	17	100	1000	1000	100
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	4	3,3	3,6	3,6	100	3,8	3,8	95
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	90	100	88	100	113,64	89	89	99
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27	27	27	27	100	27	27	100
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	27	27	27	27	100	27	27	100
9	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Hasil Evaluasi AKIP 2. Kualitas Pelaporan Keuangan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Level Maturitas SPIP	1. 80 2. 780 3. 84,99 4. 4	-	1. 72 2. 758,56 3. 83,74 4. 3	1.72,33 2. 688,33 3. 90,27 4. 3	1. 100,5 2. 90,7 3. 107,8 4. 100	1. 75 2. 770 3. 84,39 4. 3	1. 75 2. 770 3. 84,39 4. 3	1. 93,7 2. 98,7 3. 99,3 4. 75
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	5	3	3	100	3	11	78,6
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	2	2	100	2	7	77,8
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	2	2	2	2	100	2	2	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118	118	118	118	100	118	118	100
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100

1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	10	10	10	100	100	100	100
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	28	28	28	100	28	28	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian hasil Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel TC-30 berikut ini :

Tabel TC-30. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Capaian Tahun	
					2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	105	-	112,0	112,2	112,4	112,6	112,8	103,3	102,95	112,6	112,8
2	Skor PPH	Nilai	95,2	-	89,7	90	90,6	91,2	91,8	91,3	92,5	91,2	91,8
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (TPB2)	Ku/Ha	-	-	65,5	65,7	65,9	66,1	66,3	65,76	63,71	66,1	66,3
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	-	-	17,86	18,00	18,30	18,60	19,19	21,73	18,3	18,60	19,19
5	NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Nilai	-	-	100,12	100,25	100,39	101,00	101,25	102,99	103,95	101,00	101,25
6	Produksi padi	Ton	-	-	390.000	399.000	410.000	417.000	426.234	509.302	482.645	417.000	426.234
7	Produksi jagung	Ton	-	-	20.000	21.000	21.200	23.000	24.000	36.253	20.590	23.000	24.000
8	Produksi cabe merah	Ton	-	-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	4.145	3.004	3.300	3.400
9	Produksi kopi	Ton	-	-	685	700	715	730	735	1.185	1.082	730	735
10	Skor PPH ketersediaan	Nilai	-	-	90,92	91,02	91,12	91,22	91,32	95,97	94,61	91,22	91,32
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)	%	-	-	100	100	100	100	100	105,2	107,4	100	100
12	Jumlah ketersediaan energi per kapita	kcal/ kap/ hari	-	-	2400	2400	2400	2400	2400	2.636	2.867	2400	2400
13	Jumlah ketersediaan protein per kapita	gr/kap /hari	-	-	63	63	63	63	63	82,29	91,64	63	63
14	Indeks Pertanaman	Persen	-	-	180	190	200	210	220	199,54	218	210	220
15	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	-	-	86	87	88	89	90	86,95	88	89	90

Kabupaten Ciamis merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Berdasar indikator kinerja program yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Produksi padi periode tahun 2018-2022 meningkat rata-rata 0,45% per tahun. Peningkatan produksi padi didukung karena peningkatan luas panen mengalami peningkatan sekitar 1,33% per tahun. Peningkatan luas panen ini dilakukan dengan penanganan pertanian yang intensif, yaitu peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*).

Produksi jagung periode tahun 2018-2022 menurun rata-rata -10,82% per tahun. Penurunan produksi terjadi akibat masih rendahnya minat petani untuk membudidayakan jagung secara mandiri, sementara bantuan benih jagung dari Kementerian Pertanian menurun, masih diperlukan upaya agar petani dapat menyediakan benih jagung untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, serta terdapat serangan hama ulat grayak yang cukup luas. Upaya peningkatan produktivitas sudah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit tanaman, penggunaan alsintan termasuk alsintan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil.

Komoditas Cabe juga mengalami penurunan produksi dari realisasi 4.145 ton di tahun 2021 menjadi 3.004 ton pada tahun 2022. Penurunan terjadi karena harga yang rendah sehingga petani tidak menggarap dan memelihara pohon cabenya serta adanya alih fungsi lahan.

Produksi kopi periode tahun 2018-2022 meningkat rata-rata 9,83% per tahun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya minat petani dalam menanam kopi akibat harga yang cukup bagus. Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas kopi melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan peremajaan, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan bibit bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.

Untuk 2 (dua) sasaran lainnya Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2022, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta Skor PPH, keduanya telah melampaui target. Keberhasilan capaian IKU PD Dinas Pertanian dan Pangan merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanian dan Pangan, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2022.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga tujuan Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
2. Pengembangan lumbung pangan masyarakat
3. Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
4. Peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan.
5. Mewujudkan sentra agribisnis komoditas unggulan
6. Tersedianya akses permodalan bagi petani
7. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
8. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian.

Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2024 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.

3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.
5. Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan menangani sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan menangani urusan ketahanan pangan, Bidang Sarana dan Prasarana menangani sarana prasarana pertanian, dan Bidang Penyuluhan menangani penyuluhan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Ciamis dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan

memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan pertanian.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. terbatasnya penggunaan benih unggul tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
3. nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan masih rendah
4. terbatasnya alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani
5. terbatasnya sdm penyuluh pertanian
6. penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal
7. masih adanya lokasi areal pertanian endemis organisme pengganggu tumbuhan
8. akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal
9. krisis regenerasi petani
10. belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
11. pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Ciamis dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:

Tantangan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi adalah:

1. Laju pertumbuhan penduduk;
2. Alih fungsi lahan
3. Tingkat konsumsi produk impor
4. Potensi daerah rawan pangan;
5. Alih fungsi profesi
6. Ancaman OPT dan dampak fenomena iklim

Peluang dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan adalah :

1. Era Revolusi Industri 4.0
2. Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan pertanian
3. Kawasan Pengembangan Pertanian
4. Peluang kerjasama dengan pihak lain
5. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk pertanian
6. Ketersediaan lahan.

Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan
2. Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan
3. Peningkatan kualitas produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian
4. Penerapan teknologi produksi pertanian serta mekanisasinya secara terpadu
5. Penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas SDM agribisnis
6. Penguatan jalan pertanian
7. Penanggulangan penyakit tanaman
8. Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional
9. Penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan lahan dan air
10. Pemantapan penataan agribisnis
11. Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam.

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dalam RKPD diinformasikan rencana kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. RKPD dibuat dengan mengacu

RPJMD Kabupaten Ciamis, serta menyesuaikan dengan RKPD Jawa Barat dan RKP, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul.

Hasil Reviu terhadap program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas Pertanian dan Pangan di sajikan melalui Tabel TC-31 di bawah ini.

Tabel TC-31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		<i>Persentase Angka Kecukupan Energi</i>	100%	3.100.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		<i>Persentase Angka Kecukupan Energi</i>	100%	3.100.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase ketersediaan pangan utama</i>	19%	3.100.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase ketersediaan pangan utama</i>	19%	3.100.000	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	1 unit	1.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	1 unit	1.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi		<i>Jumlah Koordinasi dan</i>	1 laporan	1.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi		<i>Jumlah Koordinasi dan</i>	1 laporan	1.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Penyediaan Infrastruktur Logistik		<i>Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>			Penyediaan Infrastruktur Logistik		<i>Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>			
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	1 unit	1.000.000	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	1 unit	1.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1. Ketersediaan energi 2. Ketersediaan protein	1. 2.400 kkal/kap/hr 2. 63 gr/kap/hr	1.780.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1. Ketersediaan energi 2. Ketersediaan protein	1. 2.400 kkal/kap/hr 2. 63 gr/kap/hr	1.780.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		<i>Persentase stabilisasi harga pangan segar</i>	90%	320.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		<i>Persentase stabilisasi harga pangan segar</i>	90%	320.000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>	1 laporan	10.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>	1 laporan	10.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	1 laporan	10.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	1 laporan	10.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan</i>	5 unit	10.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan</i>	5 unit	10.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			<i>Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>					<i>Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>			
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>	5 unit	150.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>	5 unit	150.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	1 laporan	130.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	1 laporan	130.000	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	1 dokumen	10.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	1 dokumen	10.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		<i>Persentase cadangan pangan yang dikelola</i>	45%	340.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		<i>Persentase cadangan pangan yang dikelola</i>	45%	340.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	26 ton	330.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	26 ton	330.000	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara</i>	10 ton	10.000	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara</i>	10 ton	10.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		<i>Jumlah capaian konsumsi pangan</i>	2.150 kkal/kap/hr	1.120.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		<i>Jumlah capaian konsumsi pangan</i>	2.150 kkal/kap/hr	1.120.000	
	Penyusunan dan Penetapan Target		<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 dokumen	60.000	Penyusunan dan Penetapan Target		<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 dokumen	60.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	1 laporan	910.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	1 laporan	910.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	1 laporan	150.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	1 laporan	150.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		<i>Persentase desa rawan pangan yang dibina</i>	70%	430.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		<i>Persentase desa rawan pangan yang dibina</i>	70%	430.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		<i>Cakupam desa rentan rawan pangan yang dibina</i>	15%	70.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		<i>Cakupam desa rentan rawan pangan yang dibina</i>	15%	70.000	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 dokumen	70.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 dokumen	70.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Cakupan lokasi penanganan kerawanan pangan</i>	70%	360.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Cakupan lokasi penanganan kerawanan pangan</i>	70%	360.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)</i>	1 dokumen	300.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)</i>	1 dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>					<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 laporan	60.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 laporan	60.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		<i>Persentase pengujian sampel pangan segar</i>	75%	170.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		<i>Persentase pengujian sampel pangan segar</i>	75%	170.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase pengujian keamanan pangan yang dilakukan</i>	75%	170.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase pengujian keamanan pangan yang dilakukan</i>	75%	170.000	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>	1 dokumen	110.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>	1 dokumen	110.000	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	1 dokumen	60.000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	1 dokumen	60.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Level Maturitas SPIP Hasil evaluasi AKIP Kualitas pelaporan keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	4 Nilai A Predikat 780 Nilai 84.99 Nilai	22.439.454,947	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Level Maturitas SPIP Hasil evaluasi AKIP Kualitas pelaporan keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	4 Nilai A Predikat 780 Nilai 84.99 Nilai	22.439.454,947	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran,</i>	3 dokumen	614.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran,</i>	3 dokumen	614.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Kinerja Perangkat Daerah		<i>dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>			Kinerja Perangkat Daerah		<i>dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dokumen	600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dokumen	600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 laporan	14.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 laporan	14.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Tersedianya dokumen laporan keuangan</i>	2 dokumen	18.262.954,947	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Tersedianya dokumen laporan keuangan</i>	2 dokumen	18.262.954,947	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	118 orang/bulan	18.238.954,947	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	118 orang/bulan	18.238.954,947	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 laporan	12.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 laporan	12.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 laporan	12.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 laporan	12.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Aparatur pertanian yang terdidik dan terla</i>	2 orang	12.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Aparatur pertanian yang terdidik dan terla</i>	2 orang	12.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 orang	12.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 orang	12.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	33.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	33.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	210.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	210.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	71.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	71.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	110.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	110.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 dokumen	20.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 dokumen	20.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 laporan	250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 laporan	250.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		<i>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan</i>	12 bulan	65.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		<i>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan</i>	12 bulan	65.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pemerintah Daerah		<i>pemerintahan daerah</i>			Pemerintah Daerah		<i>pemerintahan daerah</i>			
	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 unit	65.000	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 unit	65.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 bulan	651.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 bulan	651.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 laporan	1.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 laporan	1.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	350.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 laporan	300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 laporan	300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 bulan	2.140.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 bulan	2.140.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	100 unit	440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	100 unit	440.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	28 unit	1.700.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	28 unit	1.700.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian	66,3 kw/ha	960.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian	66,3 kw/ha	960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	100%	800.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	100%	800.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		<i>Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 laporan	200.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		<i>Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 laporan	200.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		<i>Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	1 laporan	300.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		<i>Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	1 laporan	300.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>	1 laporan	50.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan</i>	1 laporan	50.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>	1 laporan	50.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan</i>	1 laporan	50.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i>	1 laporan	50.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura</i>	1 laporan	50.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura</i>	1 laporan	50.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan		<i>Cakupan lokasi sebaran benih unggul lokal</i>	14,8%	160.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan		<i>Cakupan lokasi sebaran benih unggul lokal</i>	14,8%	160.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman		<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	160.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman		<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	160.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Indeks Pertanaman	220 %	17.500.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Indeks Pertanaman	220 %	17.500.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian</i>	18,5%	1.300.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian</i>	18,5%	1.300.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 laporan	600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 laporan	600.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana pascapanen Tanaman Pangan		<i>Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana pascapanen Tanaman Pangan		<i>Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan		<i>Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan		<i>Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura		<i>Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura		<i>Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan</i>	1 unit	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		<i>dan dimanfaatkan</i>			Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		<i>dan dimanfaatkan</i>			
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana pengolahan Hasil Perkebunan		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana pengolahan Hasil Perkebunan		<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	1 unit	100.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>	1 dokumen	100.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>	1 dokumen	100.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun</i>	100%	16.200.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		<i>Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun</i>	100%	16.200.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		<i>umlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		<i>umlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	200.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di		<i>Jumlah Balai Penyuluh di</i>	3 unit	2.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di		<i>Jumlah Balai Penyuluh di</i>	3 unit	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Kecamatan serta Sarana pendukungnya		<i>Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>			Kecamatan serta Sarana pendukungnya		<i>Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	400.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 unit	400.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	28 unit	13.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	28 unit	13.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		<i>Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	90%	300.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		<i>Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	90%	300.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		<i>Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	90%	300.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		<i>Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	90%	300.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	1.000 Ha	200.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	1.000 Ha	200.000	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	500 Ha	50.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	500 Ha	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	1 laporan	50.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	1 laporan	50.000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		<i>Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan</i>	90%	300.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		<i>Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan</i>	90%	300.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase usaha pertanian yang mendapat pengawasan</i>	90%	300.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase usaha pertanian yang mendapat pengawasan</i>	90%	300.000	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		<i>Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</i>	1 dokumen	25.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		<i>Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</i>	1 dokumen	25.000	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin usaha pertanian</i>	10 dokumen	250.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin usaha pertanian</i>	10 dokumen	250.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>	1 laporan	25.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>	1 laporan	25.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya</i>	4%	5.440.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya</i>	4%	5.440.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		<i>Persentase SDM pertanian terlatih</i>	90%	5.440.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		<i>Persentase SDM pertanian terlatih</i>	90%	5.440.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang</i>	27 unit	410.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang</i>	27 unit	410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			<i>Ditingkatkan Kapasitasnya</i>					<i>Ditingkatkan Kapasitasnya</i>			
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	27 unit	910.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	27 unit	910.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	27 unit	4.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	27 unit	4.000.000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	1 unit	120.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	1 unit	120.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan selain bersifat top down juga harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengakomodir usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan untuk usulan 2024. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.

Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup

aparatur pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Kebijakan pengembangan pangan lokal dan pelaksanaannya merupakan sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan. Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengkaji dan menyeleksi program dan kegiatan usulan masyarakat tersebut berdasarkan pada sasaran daerah dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan Meningkat, difokuskan pada strategi peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat dengan indikator kegiatan:
 - a. Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras)
 - b. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) – Beras
 - c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
 - d. Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana
 - e. persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi
 - f. Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana
 - g. Persentase Pengawasan keamanan pangan
2. Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat, difokuskan pada strategi Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan indikator kegiatan:
 - a. Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi
 - b. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman)
 - c. Jumlah produksi benih padi tersertifikasi
 - d. Jumlah desa yang terverifikasi luasan KP2B
 - e. Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana
 - f. Jumlah luasan puso /gagal panen karena organisme pengganggu tanaman (OPT).

Dalam Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini para pemangku kepentingan menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah, keselarasan program kegiatan pembangunan daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Jawa Barat. Menyelaraskan program kegiatan OPD ini ditujukan untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Selanjutnya usulan-usulan program dan kegiatan hasil sidang pleno yang disimpulkan disesuaikan dalam Rancangan RKPD. Pada perencanaan tahun 2024 ini selain mengakomodir program prioritas pembangunan daerah, juga mengakomodir pokok pikiran dewan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat bersinergi dengan program kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui meningkatkan pendapatan petani. Untuk hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel TC-32 berikut ini.

Tabel TC-32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Cibangkong RT 009 RW 021 Desa Kawunglarang Rancah, Kab. Ciamis	Rancah	Kawunglarang	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
2	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Desa Dadiharja, Kab. Ciamis	Rancah	Dadiharja	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
3	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Karangtanjung Desa Dadiharja, Kab. Ciamis	Rancah	Dadiharja	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
4	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sitularang Landeuh Rt 01 Rw 01, Kab. Ciamis	Rancah	Situmandala	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
5	Pengembangan cadangan pangan : penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Dusun Sitularang Tonggoh Rt 06 Rw 06, Kab. Ciamis	Rancah	Situmandala	Pengembangan cadangan pangan : penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	1 unit	
6	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Tarikolot Rt 016 Rw 015, Kab. Ciamis	Rancah	Situmandala	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
7	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Curug, Kab. Ciamis	Rancah	Giriharja	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
8	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	RT 04 RW 10 Dusun Margasari, Kab. Ciamis	Sukadana	Margajaya	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
9	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	Jalan A Raksadinata No 17, Kab. Ciamis	Sukadana	Salakaria	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
10	Pengembangan produksi pertanian : pengadaan alsintan	Desa, Pabrik, Ciilat, Cariu, Kedung, Sukamaju, Sukamulya, Sukamanah, Kab. Ciamis	Sukadana	Sukadana	Pengembangan produksi pertanian : pengadaan alsintan	1 unit	
11	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Salegok RT 035 RW 010 Desa Ciparigi Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Kab. Ciamis	Sukadana	Ciparigi	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
12	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) : Pengadaan sarana perbenihan, demplot, sarana pertanaman	Dusun Kidul RT.10 RW.04 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing, Kab. Ciamis	Cijeungjing	Cijeungjing	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) : Pengadaan sarana perbenihan, demplot, sarana pertanaman	1 unit	
13	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Dusun Wetan RT.05 RW.02, Kab. Ciamis	Jatinagara	Bayasari	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
14	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Kutasari Rt.09 Rw.03, Kab. Ciamis	Jatinagara	Dayeuhluhur	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
15	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Winangun Rt.41 Rw.11, Kab. Ciamis	Jatinagara	Dayeuhluhur	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
16	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	Desa Mulyasari, Kab. Ciamis	Jatinagara	Mulyasari	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	1 unit	
17	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	dusun cikujang girang , Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukamaju	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
18	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Dusun Kendal, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukahaji	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
19	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Dusun Cianda, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukahaji	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
20	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Desa Kaler RT 003 RW 003 Cihaurbeuti , Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
21	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Desa Tengah RT 001 RW 003 dan Dusun Baketrak RT 001 RW 008, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
22	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) : Pengadaan sarana perbenihan, demplot, sarana pertanaman	Desa Sukasetia, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukasetia	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) : Pengadaan sarana perbenihan, demplot, sarana pertanaman	1 unit	
23	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Kertasri RT 005 RW 003 , Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Pasirtamiang	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
24	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Desa Rt.001, Rw. 001, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukamulya	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
25	Pengembangan kawasan lumbung padi : DAM Parit	Dusun Sukajadi RT 002 RW 007, Kab. Ciamis	Cihaurbeuti	Sukahurip	Pengembangan kawasan lumbung padi : DAM Parit	1 unit	
26	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Mulyajaya Rt 01 Rw 12, Kab. Ciamis	Cisaga	Cisaga	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
27	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Pagambiran RT 002 RW 001, Kab. Ciamis	Cisaga	Girimukti	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
28	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Mulyajaya Rt 005 Rw 007 dan DusunCimanggu Rt 001 Rw 014, Kab. Ciamis	Cisaga	Cisaga	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
29	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan	Dusun Cisagakota, Kab. Ciamis	Cisaga	Cisaga	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan	1 unit	
30	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Bangbayang Kaler RT 005 RW 011 Desa Bangbayang, Kab. Ciamis	Cipaku	Bangbayang	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
31	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Ciawitali, Desa Selacai, Kab. Ciamis	Cipaku	Selacai	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
32	Pertanian ramah lingkungan : DAM Parit	Dusun Sindang Girang RT 007 RW 007, Kab. Ciamis	Cipaku	Cipaku	Pertanian ramah lingkungan : DAM Parit	1 unit	
33	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Rt.003 RW.014 Dusun Babakan , Kab. Ciamis	Cipaku	Jalatrang	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
34	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Rt.005 Rw.010 Dusun Cimanggu, Kab. Ciamis	Cipaku	Jalatrang	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
35	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Dusun Lamping RT 002 RW 008 Desa Bangbayang, Kab. Ciamis	Cipaku	Bangbayang	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
36	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	Dusun Cipaku Girang RT004 RW 004, Kab. Ciamis	Cipaku	Cipaku	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	1 unit	
37	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Maparah I, Dusun Maparah II, Kab. Ciamis	Panjalu	Maparah	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
38	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Maparah I, Kab. Ciamis	Panjalu	Maparah	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
39	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Blok Pamengker , Kab. Ciamis	Panawangan	Jagabaya	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
40	Rehabilitasi Saluran irigasi	Dusun Cogreg RT 02 RW 07, Kab. Ciamis	Panawangan	Mekarbuana	Rehabilitasi Saluran irigasi	1 unit	
41	Pembangunan Jembatan	Dusun Cisapi Blok Rancening-Pasir Bitung, Kab. Ciamis	Panawangan	Natanegara	Pembangunan Jembatan	1 unit	
42	Peningkatan Jalan Lingkungan	Dusun Cisapi Blok baduangsa, Kab. Ciamis	Panawangan	Natanegara	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 unit	
43	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	Desa Nagrapageuh, Kab. Ciamis	Panawangan	Nagrapageuh	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
44	Peningkatan Jalan Poros Desa	RT.001 RW.007 Dusun Cibariwal, Kab. Ciamis	Panawangan	Kertayasa	Peningkatan Jalan Poros Desa	1 unit	
45	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Panawangan RT. 008 RW. 001, Kab. Ciamis	Panawangan	Panawangan	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
46	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Cigobang RT. 002 RW. 001, Kab. Ciamis	Panawangan	Panawangan	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
47	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	RT 01 RW 01 Dusun Cikupa, Kab. Ciamis	Lumbang	Cikupa	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
48	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	RT 05 RW 05 Dusun Lamping, Kab. Ciamis	Lumbang	Cikupa	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
49	Pengembangan kawasan lumbang padi : jalan usaha tani	Lumbanggirang II RT 052 RW 018, Kab. Ciamis	Lumbang	Lumbungsari	Pengembangan kawasan lumbang padi : jalan usaha tani	1 unit	
50	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Garunggang , Kab. Ciamis	Rajadesa	Tanjungsari	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
51	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Ciri Mekar RT 01 RW 01, Kab. Ciamis	Rajadesa	Sukaharja	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
52	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	Desa Winduraja, Kab. Ciamis	Kawali	Winduraja	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	1 unit	
53	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Kiawalawang - Dusun Lintungpaku, Kab. Ciamis	Kawali	Karangpawitan	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
54	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Dusun Kubangpari Blok Karang Sari, Kab. Ciamis	Pamarican	Bangunsari	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
55	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Muktisari rt 01 rw 01 Desa Bantarsari Kec Pamarican, Kab. Ciamis	Pamarican	Bantarsari	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
56	Pengembangan kawasan agropolitan : embung pertanian	Dusun Cilisung RT 08 RW 03 Desa Bnatarsari Kec Pamarican, Kab. Ciamis	Pamarican	Bantarsari	Pengembangan kawasan agropolitan : embung pertanian	1 unit	
57	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Pasireungit rt 12 Rw 04 , Kab. Ciamis	Pamarican	Pasirnagara	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
58	Sarana prasarana dan Infrastruktur Perdesaan	Dusun Pamarican Desa Pamarican, Kab. Ciamis	Pamarican	Pamarican	Sarana prasarana dan Infrastruktur Perdesaan	1 unit	
59	Pengembangan produksi pertanian : pengadaan alsintan	Dusun Sirnarasa Dusun Pasirangka Dusun Goler Dusun Mekarsari, Kab. Ciamis	Cimaragas	Beber	Pengembangan produksi pertanian : pengadaan alsintan	1 unit	
60	Pengembangan produksi pertanian : penyediaan sarana produksi tanaman pangan (benih, pupuk, pestisida)	Desa Bojongmalang, Kab. Ciamis	Cimaragas	Bojongmalang	Pengembangan produksi pertanian : penyediaan sarana produksi tanaman pangan (benih, pupuk, pestisida)	1 unit	
61	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Legoknyenang, Kab. Ciamis	Cimaragas	Raksabaya	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
62	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Jalan Perkebunan Cikaso-Cipicung, Kab. Ciamis	Banjaranyar	Cikaso	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
63	P2WKSS : Pemberian benih sayuran, polibag, pupuk, pestisida	Dusun Pongporang Desa Sindangrasa kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat., Kab. Ciamis	Banjaranyar	Sindangrasa	P2WKSS : Pemberian benih sayuran, polibag, pupuk, pestisida	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
64	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Dusun Pongporang - Pasiripis, Kab. Ciamis	Banjaranyar	Sindangrasa	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	
65	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	4 Dusun di Desa Kalijaya , Kab. Ciamis	Banjaranyar	Kalijaya	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
66	Penurunan stunting : Pengembangan Padi biofortifikasi (benih, pupuk, pestisida)	4 Dusun di Desa Kalijaya, Kab. Ciamis	Banjaranyar	Kalijaya	Penurunan stunting : Pengembangan Padi biofortifikasi (benih, pupuk, pestisida)	1 unit	
67	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Karangmulya RT 034 RW 008 Desa Langkapsari, Kab. Ciamis	Banjaranyar	Langkapsari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
68	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	Dodowolong Desa Banjaranyar, Kab. Ciamis	Banjaranyar	Banjaranyar	Pengembangan kawasan agropolitan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
69	Peningkatan Jalan Poros Desa	Dusun Citamiang, Dusun Cibodas, Dusun Cikawung, Kab. Ciamis	Lakbok	Cintaratu	Peningkatan Jalan Poros Desa	1 unit	
70	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	Dusun Banjarharja Volume : P 800 X L 4 m Rp : 1.2 Milyar, Kab. Ciamis	Lakbok	Kertajaya	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	1 unit	
71	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Baregbeg , Kab. Ciamis	Lakbok	Baregbeg	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
72	Rehabilitasi Saluran irigasi	Wilayah Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Kab. Ciamis	Lakbok	Kalapasawit	Rehabilitasi Saluran irigasi	1 unit	
73	Pembangunan TPT (Jalan)	Dusun Banjarharja RT.007 RW.002 Desa Kertajaya , Kab. Ciamis	Lakbok	Kertajaya	Pembangunan TPT (Jalan)	1 unit	
74	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Jatibarang, Kab. Ciamis	Lakbok	Sindangangin	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
75	Pengembangan kawasan lumbung padi : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sindangasih RT. 21 sampai RT. 20 RW. 04 Desa Sidaharja, Kab. Ciamis	Lakbok	Sidaharja	Pengembangan kawasan lumbung padi : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
76	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Jamban RT. 17 RW. 04 Desa Sidaharja, Kab. Ciamis	Lakbok	Sidaharja	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
77	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	Dusun Jamban Desa Sidaharja Sampai Sapuanging, Kab. Ciamis	Lakbok	Sidaharja	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	1 unit	
78	Jalan	Dusun Pondokunyor RT 017 - RT 012 , Kab. Ciamis, Lakbok, Cintajaya	Lakbok	Cintajaya	Jalan	1 unit	
79	Jalan	Perbatasan Dusun Pondokunyor RT 021 dengan Dusun Nambo RT 022 , Kab. Ciamis, Lakbok, Cintajaya	Lakbok	Cintajaya	Jalan	1 unit	
80	Jalan	Dusun Sidamukti RT 011 RW 002 , Kab. Ciamis, Lakbok, Cintajaya	Lakbok	Cintajaya	Jalan	1 unit	
81	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	Desa Sindangsari-Desa Nasol , Kab. Ciamis	Cikoneng	Sindangsari	Pengembangan produksi pertanian : DAM Parit	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
82	Pengembangan kawasan agropolitan : penyediaan sarana produksi hortikultura dan perkebunan (benih,	Dusun Ranjirata, Kab. Ciamis	Cikoneng	Cimari	Pengembangan kawasan agropolitan : penyediaan sarana produksi hortikultura dan perkebunan (benih,	1 unit	
83	Pertanian ramah lingkungan : jalan usaha tani	Dusun awisari , Kab. Ciamis	Cikoneng	Cikoneng	Pertanian ramah lingkungan : jalan usaha tani	1 unit	
84	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Desa Wanasigra, Kab. Ciamis	Sindangkasih	Wanasigra	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
85	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	Dusun Desakaler RT.06/RW.03, Kab. Ciamis	Sindangkasih	Gunungcupu	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian : Pelatihan petani, sekolah lapang	1 unit	
86	P2WKSS : Pemberian benih sayuran, polibag, pupuk, pestisida	RT.13 RW.02 Dusun Cihideung 1, Kab. Ciamis	Sindangkasih	Budiasih	P2WKSS : Pemberian benih sayuran, polibag, pupuk, pestisida	1 unit	
87	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Campaka Blok Salam ke Jalan Raya Siliwangi Dusun Sukamantri III, Kab. Ciamis	Sukamantri	Sukamantri	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
88	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	Dusun Cikarop Rt/Rw 011/005 Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri, Kab. Ciamis	Sukamantri	Tenggerraharja	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	1 unit	
89	Peningkatan Jalan Lingkungan	Dusun Cibeureum Rt 36 Rw 08, Kab. Ciamis	Banjarsari	Cibadak	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 unit	
90	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Saluran Irigasi BBH Dusun Kubangpari, Kab. Ciamis	Banjarsari	Ciherang	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
91	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Jalan Cidudungu Dusun Sukamaju RT 09 RW 02, Kab. Ciamis	Banjarsari	Banjarsari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
92	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	dusun neglasari desa banjarsari-jalan pasir angin dusun sukamulya kecamatan banjarsari, Kab. Ciamis	Banjarsari	Banjarsari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
93	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Cikohkol sukamulya Desa sukasari, Kab. Ciamis	Banjarsari	Sukasari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
94	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Rt 06 Rw 04 Neglasari sampai dengan Rt 02 Rw 01 Dusun Sukamaju Desa Kutawaringin, Kab. Ciamis	Purwadadi	Kutawaringin	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
95	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Rt 01 Rw 05 ke Rt b06 Rw 06 Dusun Buniasih Rt 01 Rw 05 samapai Rt 04 Rw 06 Dusun Buniasih Desa Kutawaringin, Kab. Ciamis	Purwadadi	Kutawaringin	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
96	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	Bantardawa, Dusun Sukadana Rt 18 Rw 05, kab ciamis, Kab. Ciamis	Purwadadi	Bantardawa	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	1 unit	
97	Sarana prasarana dan Infrastruktur Perdesaan	Dusun Tangkeban RT. 017 RW. 004, Kab. Ciamis	Purwadadi	Purwadadi	Sarana prasarana dan Infrastruktur Perdesaan	1 unit	
98	Pengembangan kawasan lumbung padi : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sindangsari - Sindangkasih RT.01-10/01 dan RT.01-10/05, Kab. Ciamis	Purwadadi	Purwajaya	Pengembangan kawasan lumbung padi : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
99	Pengembangan kawasan agropolitan : pengadaan alsintan	Dusun Panineungan RT.05/08, Kab. Ciamis	Purwadadi	Purwajaya	Pengembangan kawasan agropolitan : pengadaan alsintan	1 unit	

No	Program/Kegiatan	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
100	Rehabilitasi Saluran irigasi	Dusun Karanganyar RT 027 RW 004, Kab. Ciamis	Purwadadi	Sukamulya	Rehabilitasi Saluran irigasi	1 unit	
101	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	RW 001-013, Kab. Ciamis	Ciamis	Sindangrasa	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	1 unit	
102	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	RW 001-013, Kab. Ciamis	Ciamis	Sindangrasa	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
103	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	RW 001-013, Kab. Ciamis	Ciamis	Sindangrasa	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
104	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	Dusun Gunungsari, Kab. Ciamis	Cidolog	Hegarmanah	Pengembangan produksi pertanian : embung pertanian	1 unit	
105	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Sungai Cigerentel Dusun Pabuaran , Kab. Ciamis	Cidolog	Ciparay	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
106	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Cipasang, Dusun Sukamulya Blok rancabiuk, Kab. Ciamis	Tambaksari	Tambaksari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
107	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Desa Kaso, Kab. Ciamis	Tambaksari	Kaso	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
108	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Garatengah, Kab. Ciamis	Tambaksari	Sukasari	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
109	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	dusun warudoyong, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sindangherang	Pengembangan kawasan lumbung padi : jalan usaha tani	1 unit	
110	Rehabilitasi Saluran irigasi	RT.04 RW.06 dusun bungursri, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sindangherang	Rehabilitasi Saluran irigasi	1 unit	
111	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Sindanghurip RT 003 RW 003, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sindangmukti	Pengembangan produksi pertanian : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
112	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	Dusun Panoongan RT 14 RW 05, Kab. Ciamis	Panumbangan	Kertaraharja	Pertanian ramah lingkungan : jaringan irigasi usaha tani	1 unit	
113	Rehabilitasi Saluran irigasi	Dusun Landeuh RT 003 RW 002 Desa Sindangbarang, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sindangbarang	Rehabilitasi Saluran irigasi	1 unit	
114	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Cingoled - Banjarsari, Kab. Ciamis	Panumbangan	Jayagiri	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
115	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	Dusun Sukamanah Rt 01 Rw 01, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sukakerta	Pengembangan produksi pertanian : jalan usaha tani	1 unit	
116	Pembangunan Jembatan	Dusun Payungsari , Kab. Ciamis	Panumbangan	Payungsari	Pembangunan Jembatan	1 unit	
117	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dusun Nyangkot RT 006 RW 009, Kab. Ciamis	Panumbangan	Panumbangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1 unit	
118	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Blok Cigambir , Kab. Ciamis	Panumbangan	Jayagiri	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	
119	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	Jalan Cikuda- Buanamekar, Kab. Ciamis	Panumbangan	Sindangbarang	Pengembangan kawasan agropolitan : jalan usaha tani	1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian kedepan akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

NAWACITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra perangkat daerah terkait di lingkup Provinsi Jawa Barat, permasalahan

pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian diuraikan pada Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.1. Telaahan Keterkaitan Permasalahan dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dengan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah Terkait di Lingkup Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula, b. Terjaminnya distribusi pangan c. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi, d. Meningkatnya konsumsi pangan lokal e. Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah f. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, g. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi, h. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani, i. Meningkatnya pendapatan keluarga petani j. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian, k. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen; b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal; c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan; d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); e. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis; f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif; g. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura; h. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal; i. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan j. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal; k. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan; l. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); m. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian b. Semakin tingginya alih fungsi lahan c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi e. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian f. Aksebilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas g. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi i. keterbatasan jumlah petugas lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian dan pangan b. Daya dukung lahan dan sumber daya manusia pertanian c. Peran kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Perangkat daerah di tingkat propinsi Jawa Barat d. Tata ruang dan wilayah yang mendukung untuk pengembangan kawasan pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra perangkat daerah Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura & Dinas Perkebunan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan c. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen; b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal; c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan; d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); e. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis; f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif; g. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura; h. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal; i. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi d. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian e. Aksebilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas f. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi g. Keterbatasan jumlah petugas lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian dan pangan b. Daya dukung lahan dan sumber daya manusia pertanian c. Peran kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Perangkat daerah di tingkat propinsi Jawa Barat d. Tata ruang dan wilayah yang mendukung untuk pengembangan kawasan pertanian
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan			
	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal; b. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan; c. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); d. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan cadangan pangan pemerintah daerah b. penggalan informasi pasar pangan strategis dan koordinasi pengendalian harga belum optimal c. Fasilitas pendukung penanganan daerah rawan bencana belum optimal d. Keterbatasan fasilitas koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan cadangan beras daerah dan koordinasi dengan Bulog/Dolog b. Koordinasi bersama Tim TPID c. pengembangan pangan lokal d. Koordinasi penanganan daerah rawan pangan e. koordinasi Dewan Ketahanan Pangan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Ciamis digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, beberapa langkah yang akan dilakukan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
4. Memperkuat faktor pendukung pembangunan pertanian berupa sarana prasarana, teknologi, penguatan sumber daya manusia pertanian, optimalisasi pengelolaan lahan dan air serta penanganan industri hilir.

3.2.1. TUJUAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan tujuan yaitu :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran per kapita	69,61
2.	Meningkatnya kontribusi sector unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai Tukar Petani	112,8

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
		Skor Pola Pangan Harapan	91,8

3.2.2. SASARAN

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan terkait pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah menetapkan sasaran yaitu :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	101,25
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	607.244 ton
3.	Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor PPH ketersediaan	91,32

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIAMIS
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						52.419.454.947,00								53.506.600.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.480.000.000,00							5.791.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						5.480.000.000,00							5.791.000.000,00		
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1. Persentase Angka Kecukupan Energi	100%			100 %	3.100.000.000,00						100%	3.300.000.000,00		
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan utama	-			19 %	3.100.000.000,00			-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan 2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	3.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya															
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Cikoneng, Darmacaang Kab. Ciamis, Cikoneng, Cimari Kab. Ciamis, Cijeungjing, Cijeungjing Kab. Ciamis, Cihaurbeuti, Sukaseta Kab. Ciamis, Cihaurbeuti, Pamokolan Kab. Ciamis, Panjalu, Sandingtaman Kab. Ciamis, Panjalu, Maparah Kab. Ciamis, Panjalu, Bahara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan 2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									Kab. Ciamis, Cipaku, Pusakasari Kab. Ciamis, Cimaragas, Bojongmalang Kab. Ciamis, Sindangkasih, Budiasih Kab. Ciamis, Banjarnayar, Pasawahan Kab. Ciamis, Banjarnayar, Banjarnayar Kab. Ciamis, Banjarnayar, Cigayam Kab. Ciamis, Banjarnayar, Sindangrasa Kab. Ciamis, Banjarnayar, Cikaso Kab. Ciamis, Banjarnayar, Cikupa Kab. Ciamis, Banjarnayar, Karyamukti								
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik															
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Rancah, Situmandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.02.2.01.0008	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	1.000.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan energi 2. Ketersediaan protein	2400*kkal/kap/hr 63*gr/kap/hr			2400 kkal/kap/hr 63 gr/kap/hr	1.780.000.000,00						2400*kkal/kap/hr 63*gr/kap/hr	1.840.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	-			90 %	320.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	344.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan	Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>				1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			<i>Infomasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase cadangan pangan yang dikelola</i>	-			45 %	340.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	351.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				26 Ton	330.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		340.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0008	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				10 Ton	10.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi pangan	-			2150 kkal/kap/hr	1.120.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	1.145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	910.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		920.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase desa rawan pangan yang dibina</i>	70%			70 %	430.000.000,00						70%	468.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Cakupan desa rentan rawan pangan yang dibina</i>	-			15 %	70.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	71.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		71.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan lokasi penanganan kerawanan pangan</i>	-			70 %	360.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	395.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengujian sampel pangan segar	75%			75%	170.000.000,00						75%	185.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengujian keamanan pangan yang dilakukan	-			75%	170.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	185.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						46.939.454.947,00							47.715.600.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						46.939.454.947,00							47.715.600.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Level Maturitas SPIP Hasil evaluasi AKIP Kualitas pelaporan keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	-			4 Nilai A Predikat 780 Nilai 84.99 Nilai	22.439.454.947,00						-	22.743.600.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			3 Dokumen	614.000.000,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	665.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	14.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	-			2 Dokumen	18.262.954.947,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	18.326.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan	18.238.954.947,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		18.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur pertanian yang terdidik dan terlatih	-			2 orang	12.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	12.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengadministrasian umum perangkat daerah	-			12 Bulan	694.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	732.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	210.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	71.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	110.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		22.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	66.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	66.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	65.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		66.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	651.600.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	691.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		1.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		360.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			12 Bulan	2.140.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP	-	2.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				100 Unit	440.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				28 Unit	1.700.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	pegawai DPKP		1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Produktivitas pertanian</i>	66,3'kw/ha			66,3 kw/ha	960.000.000,00						66,3'kw/ha	1.050.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	-			100 %	800.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	880.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Ciamis, Pawindan Kab. Ciamis, Cikoneng, Sindangsari Kab. Ciamis, Cikoneng, Darmacaang Kab. Ciamis, Sadananya, Mekarjadi Kab. Ciamis, Cihaurbeuti, Cihaurbeuti Kab. Ciamis, Panjalu, Panjalu Kab. Ciamis, Cipaku, Sukawening Kab. Ciamis, Rajadesa, Andapraja Kab. Ciamis, Sukadana, Bunter Kab. Ciamis, Tambaksari, Sukasari Kab. Ciamis, Lakbok, Kertajaya Kab. Ciamis, Lakbok, Kalapasawit Kab. Ciamis, Pamarican, Sidaharja Kab. Ciamis, Cimaragas, Raksabaya Kab. Ciamis, Sindangkasih, Gunungcupu Kab. Ciamis, Baregbeg, Sukamulya Kab. Ciamis, Sukamantri, Cibeureum Kab. Ciamis, Banjaranyar, Kalijaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Sukadana, Kab. Ciamis, Cimaragas, Beber Kab. Ciamis, Purwadadi, Purwajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan 2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0008	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan 2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pasocapanen hortikultura</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan lokasi sebaran benih unggul lokal</i>	-			14,8 %	160.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	170.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	160.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Indeks Pertanaman</i>	220*Persen			220 Persen	17.500.000.000,00						220*Persen	17.710.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian</i>	-			18,5 %	1.300.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	1.510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.01.0015		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	-			100 %	16.200.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	16.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0002		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Ciamis, Sindanggrasa Kab. Ciamis, Cidolog, Hegamanah Kab. Ciamis, Kawali, Winduraja Kab. Ciamis, Cipaku, Cipaku Kab. Ciamis, Pamarsari, Bantarsari Kab. Ciamis, Purwadadi, Bantardawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Panumbangan, Panumbangan Kab. Ciamis, Panumbangan, Sukakarta Kab. Ciamis, Panumbangan, Jayagin Kab. Ciamis, Panumbangan, Sindangbarang Kab. Ciamis, Panawangan, Panawangan Kab. Ciamis, Jatinagara, Dayeuhluhur Kab. Ciamis, Rancah, Situmandala Kab. Ciamis, Rancah, Giriharja Kab. Ciamis, Tambaksari, Tambaksari Kab. Ciamis, Tambaksari, Kaso Kab. Ciamis, Tambaksari, Sukasari Kab. Ciamis, Lakbok, Sidaharja Kab. Ciamis, Lakbok, Kertajaya Kab. Ciamis, Lakbok, Cintajaya Kab. Ciamis, Lakbok, Sindangangin Kab. Ciamis, Lakbok, Baregbeg Kab. Ciamis, Banjarsari, Banjarsari Kab. Ciamis, Sukasari Kab. Ciamis, Sukamantri, Tenggeraharja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Cikoneng, Sindangsari Kab. Ciamis, Cihaurbeuti, Sukahurip Kab. Ciamis, Cihaurbeuti, Sukahaji Kab. Ciamis, Panawangan, Natanegara Kab. Ciamis, Cipaku, Jalatrang Kab. Ciamis, Cipaku, Cipaku Kab. Ciamis, Cipaku, Bangbayang Kab. Ciamis, Jatinagara, Bayasari Kab. Ciamis, Banjaranyar, Sindangrasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Panumbangan, Payungsari Kab. Ciamis, Panawangan, Natanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				28 Unit	13.000.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Ciamis, Sindanggrasa Kab. Ciamis, Cidolog, Ciparay Kab. Ciamis, Panumbangan, Sindangherang Kab. Ciamis, Panumbangan, Kertaraharja Kab. Ciamis, Panumbangan, Sindangmukti Kab. Ciamis, Panumbangan, Sindangbarang Kab. Ciamis, Cipaku, Jalatrang Kab. Ciamis, Jatinagara, Dayeuhluhur Kab. Ciamis, Rajadesa, Sukaharja Kab. Ciamis, Rancah, Situmandala Kab. Ciamis, Lakbok, Sidaharja Kab. Ciamis, Lakbok, Kalapasawit Kab. Ciamis, Banjarjari, Ciherang Kab. Ciamis, Pamarian, Pasimagara Kab. Ciamis, Cimaragas, Raksabaya Kab. Ciamis, Purwadadi, Purwajaya Kab. Ciamis, Purwadadi,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		13.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kutawaringin Kab. Ciamis, Purwadadi, Sukamulya Kab. Ciamis, Banjaranyar, Banjaranyar							
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	90%			90 %	300.000.000,00						90%	330.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	-			90 %	300.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha	200.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				500 Ha	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	90%			90 %	300.000.000,00						90%	312.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang mendapat pengawasan	-			90 %	300.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	312.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				10 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	4,0%			4,0 %	5.440.000.000,00						4,0%	5.570.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	-			90 %	5.440.000.000,00			-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat	-	5.570.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				27 Unit	410.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		420.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				27 Unit	910.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Jatinagara, Mulyasari Kab. Ciamis, Sukadana, Salakana Kab. Ciamis, Sindangkasih, Gunungcupu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		920.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				27 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ciamis, Pamarican, Pamarican Kab. Ciamis, Cisaga, Cisaga Kab. Ciamis, Purwadadi, Purwadadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		4.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pertumb uhan ekonomi yang berkualitas, Ketahanan Pangan dan Pening katan Daya Beli masyarakat	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
JUMLAH															52.419.454.947,00	53.506.600.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dan juga merupakan komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam upaya mencapai target pelayanan baik internal maupun eksternal guna mendukung visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2024 akan menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan Pembangunan Pertanian dan ketahanan pangan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis maupun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis lainnya yang memiliki sinergitas program Pembangunan dengan penerapan konsep spasial, serta dengan melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (akademisi, swasta, dan media) untuk mendorong partisipasi masyarakat;
2. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta berkaitan dengan pendanaan Pembangunan terhadap program dan kegiatan Pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, dalam hal program dan kegiatan dapat tetap dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan pelaksanaan prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis pengelolaan anggaran.

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024, maka dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. serta menjaga kesinambungan antar dokumen perencanaan yang telah maupun akan disusun pada periode berikutnya;
2. Kepala Dinas, Sekretaris, para Pejabat Administrator, para Pejabat Pengawas, dan para Pejabat Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis berkewajiban mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. Seluruh stakeholders Pembangunan Pertanian dan ketahanan pangan diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan Pembangunan Pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis.

b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 menjadi bagian dari dokumen acuan resmi yang menjadi dasar dalam rangka proses penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terjadi perkembangan dan dinamika dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dimungkinkan adanya langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yang akan dimuat dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Demikian dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini disusun untuk dipergunakan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ciamis, Agustus 2023



KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN CIAMIS,

SLAMET BUDI WIBOWO, SP. M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19670204 199603 1 004